

# KAJIAN BUDAYA

## DI ASIA TENGGARA

Arie Toursino Hadi

ARIE TOURSINO HADI

# KAJIAN BUDAYA
# DI ASIA TENGGARA

Art-Tour Media Publishing

**Kajian Budaya di Asia Tenggara**

Penulis: Arie Toursino Hadi

Penyunting: Shinta Arjunita Saputri

Cetakan pertama, Art-Tour Media Publishing, 2022



ISBN: 978-602-73618-2-9

Penerbit: CV Art-Tour Media Publishing
Babakan RT 005/002 No. 44
Ciluar, Bogor Utara, Kota Bogor, 16710

## KATA PENGANTAR PENYUNTING

Kajian budaya merupakan kajian lintas bidang yang tidak memiliki garis batas yang tegas. Budaya dalam kajian budaya sendiri memiliki makna konseptual yang cukup luas dan sering disalahartikan terbatas dalam lingkup kesenian. Padahal setiap unsur yang membentuk keseharian manusia merupakan bagian dari analisis kajian budaya, baik itu politik, agama, bahasa, maupun ekonomi. Sebagai bidang interdisipliner, di mana terdapat kelompok masyarakat maka di situ pula hadir objek kajian budaya.

Buku ini hadir untuk menambah pemahaman tentang bidang kajian budaya dengan mengambil wilayah kajian di Asia Tenggara. Pemilihan wilayah kajian ini didasarkan pada belum begitu banyaknya sumber informasi yang membahas kajian budaya di Asia Tenggara secara komprehensif. Asia Tenggara merupakan wilayah dengan diversitas unsur-unsur kebudayaan yang tinggi. Di wilayah ini dapat dijumpai negara dengan sistem pemerintahan diktator militer seperti Myanmar yang berdampingan dengan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia. Begitu pun dengan tradisi warisan turun temurun yang menjadi identitas masing-masing negara di wilayah ini baik yang telah ada sejak awal peradaban maupun berupa pengaruh yang masuk pada masa modern.

Fokus kajian dalam buku ini adalah kajian praktis, yaitu penerapan teori-teori kajian budaya melalui kumpulan tulisan tentang fenomena yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara. Karena itu, topik-topik fenomena yang dianalisis dalam buku ini tidaklah dalam satu tema tertentu yang berantai namun terdiri dari tema bahasan yang bervariasi dalam satu ruang kajian budaya. Mulai dari masalah hubungan antar

negara Asia Tenggara yang terangkum dalam topik analisis tentang organisasi ASEAN hingga kasus toleransi beragama di Malaysia. Sehingga, pembaca tidak harus membaca secara berurut dari bab pertama.

Meskipun buku ini belum merangkum semua negara-negara Asia Tenggara, namun melalui beberapa analisis kasus yang tersaji diharapkan dapat memberi sumbangsih keilmuan dan gambaran bagaimana dinamika kebudayaan di Asia Tenggara, serta keluasan dari keilmuan kajian budaya itu sendiri. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi khalayak umum dan akademisi yang tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kajian budaya di Asia Tenggara.

Kendari, Januari 2022

Shinta Arjunita Saputri

## KATA PENGANTAR PENULIS

Asia Tenggara, adalah salah satu kawasan di Benua Asia yang masyarakatnya memiliki keberagaman yang cukup tinggi. Mayoritas negara-negara di sini dibentuk karena penjajahan, kecuali Thailand tentu saja. Bahkan nama Asia Tenggara itu sendiri baru muncul ketika perang dunia kedua. Jauh sebelum perang dunia tersebut, kawasan di Asia Tenggara telah menjadi jalur perdagangan laut bagi para pedagang yang hendak ke Cina maupun ke wilayah India dan Timur Tengah.

Dengan wilayahnya yang cukup “terbuka”, masyarakat di Asia Tenggara terbiasa dengan perbedaan etnis dan kultur. Maka tidak jarang ditemukan ragam budaya yang hampir serupa antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, seperti wayang, batik, makanan tradisional, dsb.

Tiap-tiap negara memiliki identitas dan sejarahnya masing-masing, yang bila dipelajari, maka akan mudah dimengerti alasan setiap negara tersebut memiliki geopolitik dan geostrategi yang berbeda. Agaknya perbedaan tersebut tidak lantas membuat pertikaian antar satu dengan yang lain, meskipun beberapa kali sempat ada ketegangan antar negara, namun hal tersebut jadi pelajaran bagi masing-masing untuk tetap menjaga keamanan di wilayah ini.

Salah satu cara untuk menjaga keamanan wilayah dan juga menjalin kerja sama antar wilayah di Asia Tenggara, adalah dengan pembentukan ASEAN. Meskipun beranggotakan negara-negara di Asia Tengara, namun peran ASEAN tidak melebihi status masing-masing negara tersebut. Itu artinya, ASEAN tidak mencampuri urusan masing-masing negara. ASEAN bekerja sebatas jalur komunikasi antar negara di Asia Tenggara.

Akhir kata, tidak ada gading yang tidak retak. Setiap tulisan yang ada dalam buku ini terbuka untuk diberi saran dan masukan, demi berkembangnya kajian budaya, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Penulis juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan dari orang-orang yang tidak dapat disebutkan satu-satu, sehingga buku ini dapat terbit dan berada di tangan Anda untuk dibaca.

Sulawesi Tenggara, Januari 2022

Arie Toursino Hadi

# DAFTAR ISI

# SEJARAH PEMBENTUKAN ASEAN: ALTERNATIF PERSPEKTIF HUBUNGAN KEAMANAN DI ASIA TENGGARA PERIODE PERANG DINGIN

## Pendahuluan

Kawasan Asia Tenggara pada tahun 1960-an, merupakan wilayah yang kebanyakan negara-negaranya belum lama merdeka. Kawasan ini sangat rentan dipengaruhi oleh kepentingan politik besar dunia akibat perang dingin. Maka pada tahun 1967, atas prakarsa lima negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand maka dibentuklah ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Tujuan pembentukan asosiasi ini adalah agar masing-masing negara dapat berkonsentrasi dalam pembangunan bangsa, menjalin hubungan ekonomi, mencegah masuknya paham komunisme, dan mengurangi dampak buruk kekuatan eksternal. Sebelum ASEAN terbentuk, atas prakarsa Amerika Serikat, pada tahun 1954 dibentuk SEATO (*South East Asia Treaty Organization*) sebagai pencegahan penyebaran komunisme dan pengaruh Soviet secara umum di Asia Tenggara. Namun organisasi ini tidak berjalan mulus, karena hanya diikuti oleh dua negara dari kawasan Asia Tenggara, yaitu Filipina dan Thailand. Meskipun belakangan kebijakan ASEAN lebih

banyak pada putusan di bidang ekonomi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa faktor keamanan regional juga mempengaruhi terbentuknya asosiasi ini. Tiap negara pernah bersinggungan baik langsung maupun tidak dengan kekuatan politik besar di era Perang Dingin. Kesamaan nasib dan sejarah itulah yang akhirnya dapat menyatukan visi dan misi dalam membentuk ASEAN.

**Komunisme di Asia Tenggara**

Komunis masuk di Asia Tenggara melalui negara-negara yang berhubungan langsung dengan Cina dan Uni Soviet. Salah satu negara yang mendapat pengaruh komunis paling besar, bahkan hingga saat ini, adalah Vietnam. Gerakan komunisme di Vietnam tidak dapat dipisahkan dengan strategi komunisme di Asia Tenggara. Pada awalnya komunis diyakini sebagai salah satu cara untuk memperoleh kemerdekaan. Dasar keyakinan ini adalah komunisme ala Lenin merupakan jalan keluar bagi negara-negara terjajah sekaligus kalangan pekerja di seluruh penjuru dunia untuk melepaskan diri dari kontrol imperialisme barat.

Gerakan kemerdekaan yang dipimpin Ho Chi Minh belum menuai keberhasilannya hingga Vietnam diduduki Jepang pada masa Perang Dunia II (PD II) dan kembali diduduki Perancis setelah Jepang tumbang. Keinginan Perancis untuk menguasai Vietnam pasca PD II ini menyulut terjadinya Perang Indochina. Pada perang Indochina ini Amerika Serikat kemudian merasa khawatir bahwa gerakan kemerdekaan pimpinan Ho Chi Minh di Vietnam akan memberikan efek domino terhadap negara-negara yang lain dalam penyebaran ideologi komunis.

Amerika Serikat menganggap bahwa perang yang terjadi di Indochina adalah lebih dari sekedar perang anti-kolonialisme, tetapi juga merupakan sebuah bentuk dari ekspansionisme komunis. Sedangkan bagi Amerika Serikat, Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang pengaruh komunisme seharusnya dapat ditekan. Dari sini kemudian intervensi Amerika Serikat dimulai di Vietnam. Di sisi lain, Uni Soviet memberikan dukungan penuh terhadap Ho Chi Minh. Keterlibatan dua negara besar ini menandakan bahwa perang dingin secara resmi digelar di Asia Tenggara

Perang Indochina selesai dengan kekalahan Perancis pada 1954. Berakhirnya perang ini menghasilkan perjanjian tentang pembagian wilayah Vietnam menjadi dua bagian, yaitu: Vietnam Utara yang dipimpin Ho Chi Minh dengan Komunisme (didukung Soviet), dan Vietnam Selatan yang dipimpin Ngo Dinh Diem dengan anti-komunisme (didukung Amerika). Dibaginya Vietnam menjadi dua kubu yang berseberangan ini kemudian menyulut meletusnya perang saudara. Berbeda dengan Soviet yang mulai menarik diri, intervensi Amerika Serikat yang justru semakin intens dan berlebihan justru memperbanyak jatuhnya korban termasuk warga sipil dan tentara Amerika itu sendiri. Namun pada akhirnya Vietnam kembali menjadi satu kesatuan dengan kemenangan rezim komunis pada 1976.

Negara lain yang bersinggungan langsung dengan komunis adalah Indonesia. Kelahiran Komunisme di Indonesia tak bisa dilepaskan dari hadirnya orang-orang buangan politik dari Belanda dan mahasiswa-mahasiswa lulusannya yang berpandangan kiri.

Gerakan Komunis di Indonesia diawali di Surabaya, di dalam diskusi intern para pekerja buruh kereta api Surabaya yang dikenal dengan nama VSTP (*Vereniging van Spoor-en Tramwegpersoneel*). Awalnya VSTP hanya berisikan anggota orang Eropa dan Indo Eropa saja, namun setelah berkembangnya waktu, kaum pribumi juga banyak yang bergabung. Salah satu anggota yang menjadi besar adalah Semaoen kemudian menjadi ketua SI (Sarekat Islam) Semarang.

Komunisme kemudian juga aktif di Semarang, atau sering disebut dengan "Kota Merah" setelah menjadi basis PKI di era tersebut. Hadirnya ISDV (*Indische Sociaal-Democratische Vereeniging*) dan masuknya para pribumi berhaluan kiri ke dalam Sarekat Islam menjadikan komunis sebagai bagian cabangnya, yang nantinya disebut sebagai "SI Merah". ISDV sendiri sering menjadi salah satu organisasi yang bertanggung jawab atas banyaknya pemogokan buruh di Jawa.

Konflik antara SI Semarang (SI Merah) dengan SI pusat di Yogyakarta (SI Putih) mendorong diselenggarakannya kongres. Atas usulan Haji Agus Salim, yang disahkan oleh pusat SI, baik SI Merah maupun SI Putih menyepakati bahwa personel SI Merah keluar dari SI. Mantan personel SI Merah kemudian bersama ISDV berganti nama menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia).

Pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia, diawali oleh kedatangan Muso dari Uni Soviet ke Negara Republik (saat itu masih beribu kota di Yogyakarta), gerakan PKI bangkit. Sama seperti Soekarno dan tokoh pergerakan lain, Muso berpidato dengan lantang di Yogyakarta dengan pandangannya yang murni Komunisme. Di Yogyakarta, Muso juga mendidik calon-calon pemimpin PKI seperti D.N. Aidit.

Muso dan pendukungnya kemudian menuju ke Madiun. Gerakan ini didukung oleh salah satu menteri Soekarno, Amir Syarifuddin. Divisi Siliwangi akhirnya maju dan mengakhiri pemberontakan Muso ini.

Pasca Perang Kemerdekaan Indonesia, PKI menyusun kekuatannya kembali. Didukung oleh Soekarno yang ingin menyatukan semua aspek masyarakat Indonesia saat itu, di mana antar ideologi menjadi musuh masing-masing, PKI menjadi salah satu kekuatan baru dalam politik Indonesia. Ketegangan itu tidak hanya terjadi di tingkat atas saja, melainkan juga di tingkat bawah di mana tingkat ketegangan banyak terjadi antara tuan tanah dan para buruh tani.

Soekarno sendiri yang cenderung ke kiri, lebih dekat kepada PKI. Terutama setelah Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, politik luar negeri Indonesia semakin condong ke Blok Timur (Blok Uni Soviet). Indonesia lebih banyak melakukan kerja sama dengan negara komunis seperti Uni Soviet, Kamboja, Vietnam, RRT, maupun Korea Utara. Beberapa langkah-langkah politik luar negeri yang dianggap "kekiri-kirian" antara lain:

- Presiden Soekarno menyampaikan pandangan politik dunia yang berlawanan dengan barat, yaitu OLDEFO (*Old Established Forces*) dan NEFO (*New Emerging Forces*)
- Indonesia membentuk Poros Jakarta-Peking dan Poros Jakarta - Phnompenh - Hanoi - Peking-Pyongyang yang membuat Indonesia terkesan ada di pihak Blok Timur
- Konfrontasi dengan Malaysia yang berujung dengan keluarnya Indonesia dari PBB.

Di sisi lain, konflik dalam negeri semakin memanas dikarenakan krisis moneter, selain itu juga terdengar desas-

desus bahwa PKI dan militer yang bermusuhan akan melakukan kudeta. Militer mencurigai PKI karena mengusulkan Angkatan Kelima (setelah AURI, ALRI, ADRI dan Kepolisian), sementara PKI mencurigai TNI hendak melakukan kudeta atas Presiden Soekarno yang sedang sakit, tepat saat ulang tahun TNI. Kecurigaan satu dengan yang lain tersebut kemudian dipercaya menjadi sebab insiden yang dikenal sebagai Gerakan 30 September.

Pasca Gerakan 30 September, pemerintah Orde Baru mengambinghitamkan orang-orang komunis. Terjadi "pembersihan" besar-besaran atas warga dan anggota keluarga yang dituduh komunis. Para "tertuduh komunis" ini yang ditangkap kebanyakan dieksekusi tanpa proses pengadilan. Sementara bagi "para tertuduh komunis" yang tetap hidup, setelah selesai masa hukuman, baik di Pulau Buru atau di penjara, tetap diawasi dan dibatasi ruang geraknya dengan penamaan "eks-tapol".

## Paham Liberal di Asia Tenggara

Masuknya paham liberal di Asia Tenggara sebenarnya bisa digantikan dengan istilah "masuknya Amerika Serikat di Asia Tenggara," karena hanya negara ini saja yang tampak dominan membendung pengaruh Uni Soviet dan Cina (paham Komunis) di kawasan ini. Pada awalnya kawasan Asia Tenggara banyak mendapat pengaruh komunis, hal tersebut menjadi faktor bagi Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan *contaiment policy*, ketika Amerika mempropagandakan akan adanya "keamanan bersama" bagi Asia Tenggara sebagai bentuk perlawanan terhadap komunis.

Kebijakan Amerika Serikat untuk membendung komunisme ini antara lain:

- Mendirikan SEATO (*Southeast Asia Treaty Organization*) pada tahun 1954, di Manila, Filipina, yang anggotanya terdiri dari Australia, Prancis, Selandia Baru, Thailand, Pakistan, Filipina, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Organisasi ini resmi dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977.
- Mengirim pasukan ke Vietnam Selatan, untuk mengurangi dampak komunisme di Vietnam Utara. Hingga terjadi perang saudara di Vietnam, yang akhirnya dimenangkan oleh Vietnam Utara.
- Mendirikan pangkalan militer di Singapura, Thailand, dan Filipina.

Kehadiran Amerika Serikat di Asia Tenggara merupakan bentuk antisipasi dari pergerakan komunisme di Asia Tenggara. Setelah keruntuhan Uni Soviet, praktis hanya Amerika saja yang pengaruhnya masih ada di kawasan ini, sehingga jika dilanjutkan, arah pembahasan ini cenderung menuju ke subjek yang lain.

**Kesimpulan**

Bagi ASEAN isu keamanan pasca Perang Dingin mencakupi keamanan lingkungan dan keamanan ekonomi yang merujuk pada akses sumber daya, keuangan, pasar, serta upaya memelihara dan meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran. Karena itu, ASEAN melakukan kerja sama baik dengan Amerika Serikat, Cina, Rusia, Jepang, dan lain-lain sebagai kekuatan besar di Asia Tenggara. Strategi

mengembangkan keamanan regional ASEAN dengan menggandeng kekuatan negara besar yang secara hierarkis dapat diurutkan: pertama, Amerika sebagai kekuatan adidaya; kedua, Cina sebagai kekuatan besar regional; ketiga, Jepang dan India sebagai kekuatan regional; serta keempat, Australia dan Korea Selatan sebagai pemeran utama regional. Pasca Perang Dingin hubungan antara ASEAN dan Amerika masih terjalin dengan baik, bahkan hubungan Amerika dengan lima negara yang memelopori ASEAN justru semakin kuat. Dalam bidang keamanan, kekuatan Cina pasca Perang Dingin juga membuat ASEAN semakin dekat dengan Cina dalam bidang militer untuk menjaga stabilitas kawasan. Hal ini dibuktikan dengan konsep keamanan yang disebut dengan *New Security Concept* yang menekankan pada pengaturan dialog, konsultasi, dan negosiasi pada sebuah langkah sama untuk menyelesaikan perdebatan dan perlindungan perdamaian.

Peran aktor Perang Dingin sangat besar bagi kawasan regional Asia Tenggara baik sejak Perang Dingin hingga pasca Perang Dingin. Uni Soviet dan Amerika jelas memiliki kepentingan untuk menyebarluaskan ideologinya di Asia Tenggara melalui kebijakan *containment policy*-nya sehingga menjadi era konfrontasi tak langsung yang dilakukan melalui persaingan persenjataan, militer, politik, dan teknologi. Dunia cenderung terbagi ke dalam suatu aliansi, namun semua berubah ketika runtuhnya Uni Soviet dan menjadi tonggak baru bagi kerja sama bilateral maupun multilateral mampu mewujudkan perdamaian dunia. Pasca Perang Dingin negara kekuatan besar baru bermunculan, seperti Cina yang memiliki

kekuatan ekonomi dan memiliki kepentingan mencari pasar untuk barang produksinya di Asia Tenggara.

**Daftar Pustaka**

Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Peajar

Goh, Evelyn. 2007. Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies. Dalam *International Security* 32 (3): hal. 113-157

Harry A. Poeze. 2011. *Madiun 1948: PKI Bergerak*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

Harry A. Poeze. 2009. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia (Jilid 2): Maret 1946 - Maret 1947*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mansbach, Richard W & Kirsten L. Rafferty. 2008. *Introduction To Global Politics*. London & New York: Routledge.

Mortimer, Rex. 2006. *Indonesian Communism Under Soekarno: Ideologi and Politik 1959-1965*. London: Equinox Publishing.

Sacks, Milton. The Strategy of Communism in Southeast Asia. Dalam *Pacific Affairs*, Vol.23, No.3, September 1950: hlm. 227-247

Sukma, Rizal. 2000. *US-Southeast Asia Relations After The Crisis: The Security Dimension*. Jakarta: CSIS.

Weatherbee, Donald E. & Ralf Emmes. 2005. *International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy*. Oxford, UK: Rowman & Littlefield Publishers.

Yasuhiro, Yamada. 2009. *International Relations of East Asia in Transition, and ASEAN, China, the Uniited States and Japan*. Osaka University.

# FESTIVAL WAYANG DAN KOMUNITAS SOSIAL BUDAYA ASEAN

## Pendahuluan

Pada pertemuan *ASEAN Concord II* (*Bali Concord II*) di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003, para pemimpin ASEAN membentuk Komunitas ASEAN yang efektif dilaksanakan pada tahun 2020. Komunitas ASEAN tersebut terdiri dari tiga pilar, yaitu komunitas politik dan keamanan, komunitas ekonomi, dan komunitas sosial budaya masyarakat, yang tujuannya untuk saling menjalin perdamaian yang mampu bertahan lama, stabilitas, dan kemakmuran bersama di kawasan Asia Tenggara. Pada KTT ASEAN ke-12 pada tanggal 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina, para pimpinan ASEAN menegaskan komitmen mereka untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015, dengan menandatangani Deklarasi Cebu tentang Percepatan Komunitas ASEAN pada tahun 2015. KTT ASEAN ke-13 yang diselenggarakan di Singapura pada tanggal 20 November 2007, sepakat untuk mengembangkan cetak biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN untuk memastikan adanya tindakan konkret yang dilakukan untuk mempromosikan pembentukan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN.

## Komunitas Sosial Budaya ASEAN

Komunitas Sosial Budaya ASEAN bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan Komunitas ASEAN yang berpusat masyarakat, untuk mencapai solidaritas dan persatuan di antara bangsa-bangsa dan masyarakat ASEAN dengan menempa identitas umum dan membangun kepedulian masyarakat yang inklusif dan harmonis di mana kesejahteraan, mata pencaharian, dan kesejahteraan masyarakat ditingkatkan. Dalam Komunitas Sosial Budaya ASEAN membahas aspirasi daerah untuk mengangkat kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan koperasi yang berorientasi pada masyarakat dan ramah lingkungan, yang diarahkan pada promosi pembangunan berkelanjutan. Komunitas Sosial Budaya ASEAN ditandai dengan budaya ketahanan regional, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang telah disepakati, semangat kerja sama, tanggung jawab kolektif, untuk mempromosikan pembangunan manusia dan sosial, menghormati kebebasan mendasar, kesetaraan gender, promosi dan perlindungan hak asasi manusia dan promosi keadilan sosial. Komunitas Sosial Budaya ASEAN menekankan pada penghormatan pada budaya yang berbeda, bahasa, dan agama dari masyarakat ASEAN. Komunitas Sosial Budaya ASEAN juga berfokus pada dimensi sosial, mempersempit gap pembangunan dan menjembatani kesenjangan pembangunan antar negara anggota.

Berangkat dari tujuan tersebut, ada 6 poin utama dalam cetak biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN, yaitu:

1. Pembangunan Manusia (*Human Development*), yang terdiri atas 60 baris aksi;

2. Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare and Protection*), yang terdiri dari 94 baris aksi;
3. Hak-hak dan Keadilan Sosial (*Social Justice and Rights*), yang terdiri dari 28 baris aksi;
4. Memastikan Pembangunan yang Berkelanjutan (*Ensuring Enviromental Sustainability*), yang terdiri dari 98 baris aksi;
5. Membangun Identitas ASEAN (*Building ASEAN Identity*), yang terdiri dari 50 baris aksi;
6. Dan mempersempit Jurang Pembangunan (*Narrowing the Development Gap*), yang terdiri dari 8 baris aksi.

Hingga saat ini, bidang-bidang kerja sama sosial budaya dalam Komunitas ASEAN yang sudah berjalan, antara lain:

1. Kerja sama Pemajuan Perempuan; sudah dibahas sejak tahun 1975 dan telah melakukan pertemuan sampai 2004. Bahasan mencakup dari pemberdayaan perempuan ASEAN tanpa membedakan gender dari berbagai sektor (ekonomi, sosial, politik, pendidikan, budaya dan seni dan lain sebagainya), penolakan perdagangan perempuan dan anak-anak, serta eliminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Namun, semua itu hanya sampai pada pembuatan kerangka kerja saja (*Work Plan*), karena semua isu gender ini tidak ada satu Negara pun yang meratifikasinya. Inilah yang menyebabkan perjuangan perempuan di ASEAN sangat tidak mudah. Terutama Negara-negara seperti Myanmar yang pelanggaran HAM beratnya masih banyak. Indonesia yang banyak

memiliki masalah perdagangan perempuan dan anak-anak di Malaysia dan Singapura juga tidak melakukan ratifikasi untuk kerja sama bidang  perempuan ini. Sangat disayangkan. Padahal apabila semua Negara ASEAN meratifikasi perjanjian kerja sama ini, maka berbagai persoalan HAM, perdagangan dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat di selesaikan di tingkat ASEAN saja tanpa harus maju sampai ke PBB.

2. Kerja sama Bidang Pemuda; sudah di mulai sejak diselenggarakannya Konferensi Pemuda tanggal 15-17 September 1975. Bidang prioritas kerja sama bidang pemuda ini bertujuan untuk "*nurturing human, cultural and natural resources for sustained development in a harmonius and people-centered ASEAN*". Pada umumnya kerja sama pemuda ASEAN ini biasanya bersosialisasi juga dengan negara-negara yang mau kerja sama dengan pemuda ASEAN. Misalkan pertukaran pemuda ASEAN –CHINA, ASEAN-JEPANG, ASEAN-CANADA, ASEAN –KOREA SELATAN, dan sebagainya. Selain untuk mensosialisasikan budaya dan bahasa dari Negara-negara kerja sama ASEAN, tujuan yang dicapai adalah mempererat para pemuda negara –negara anggota ASEAN. Karena mereka melakukan kerja sama dengan pemuda negara lain dalam satu identitas yaitu pemuda ASEAN.
3. Kerja sama Bidang Penanggulangan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

4. Kerja sama Bidang Yayasan ASEAN yang lebih fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia, Iptek, dan Kesadaran Sosial.
5. Kerja sama Bidang Kepegawaian dan Administrasi (khusus untuk pegawai negeri sipil masing-masing negara dalam meningkatkan pelayanan publik)
6. Kerja sama Kebudayaan, Penerangan dan Pendidikan; kerja sama dalam penukaran informasi budaya masing-masing Negara ASEAN seperti pagelaran seni dan budaya antar Negara anggota ASEAN maupun dengan Negara-negara yang bekerja sama dengan Negara-negara Anggota ASEAN. Pertukaran pelajar dan pemilihan Duta Muda ASEAN untuk mensosialisasikan program-program ASEAN dan untuk lebih mempercepat proses pembentukan masyarakat ASEAN. Dibidang pendidikan, pertukaran pelajar dan pemberian beasiswa khusus untuk Negara-negara ASEAN sudah berjalan dengan baik. Dari tingkat Sekolah Menengah Umum sampai pada tingkat Doktoral (S3).
7. Kerja sama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lingkungan Hidup dan Bencana.
8. Kerja sama Bidang Pembangunan Sosial berupa Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan, kerja sama bidang Kesehatan terutama untuk menangani penyakit-penyakit yang menular di negara-negara anggota ASEAN atau pengentasan penyebaran virus-virus baru, Kerja sama Bidang Ketenagakerjaan, Kerja sama Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial meliputi Kependudukan, Anak-Anak, Penyandang Cacat, Lansia, dan Keluarga.

## Festival Wayang ASEAN

Terselenggaranya Festival Wayang ASEAN I merupakan bentuk rasa keprihatinan terhadap rendahnya perhatian masyarakat terhadap kesenian tradisional. Digagas oleh Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia (Sena Wangi), festival ini diselenggarakan di Gedung Pewayangan Kautaman, TMII, Jakarta Timur. Pergelaran tersebut berlangsung pada 29 November hingga 3 Desember 2009, yang diikuti oleh sembilan negara anggota ASEAN, yaitu Malaysia, Laos, Singapura, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Filipina, Thailand, dan Indonesia. Brunei Darussalam, yang belum memiliki wayang, datang sebagai peninjau. Festival tersebut merupakan kelanjutan kegiatan penerimaan penghargaan *Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity* dari UNESCO.

Beberapa wayang yang tampil dalam Festival Wayang ASEAN I, antara lain: *Hun Lakorn Lek* dari Thailand, Wayang Air Vietnam, dan Wayang Kulit Seri Asun Malaysia. *Hun Lakorn Lek* Thailand merupakan imitasi figur *Hun Yai* (Wayang Besar). Wayang ini merupakan bentuk kesenian kreasi baru dari Thailand. Wayang Air Vietnam diselenggarakan di kolam dengan air setinggi dada. Air inilah yang menjadi panggung utama wayang, sementara sang dalang berada di belakang layar dengan bentuk rumah tradisional Vietnam. Wayang Air lahir dari kalangan petani. Pertama kali digelar di delta Sungai Merah, Vietnam. Selain berlatar kehidupan desa, cerita Wayang Air menampilkan legenda dan sejarah Vietnam. Wayang Kulit Seri Asun Malaysia. Wayang ini merupakan warisan dari wayang kulit Thailand (*Nang Thalung*). Versi

wayang kulit ini kemudian diserap ke dalam wayang kulit Melayu (Wayang *Gedek*). Cerita umumnya berisi tentang epik lama, mirip wayang Indonesia. Pada perjalanannya wayang ini menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dalangnya pun menggunakan bahasa campuran Inggris, Melayu dialek Kedah dan bahasa Thailand.

Festival selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 18 September 2014 di Taman Budaya Jawa Tengah, Solo, dengan nama Kolaborasi Seni Pertunjukan Wayang Tradisional ASEAN-Tiongkok 2014. Festival ini diikuti oleh delapan negara ASEAN, yaitu Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Brunei, Kamboja, Myanmar, Indonesia, dan satu negara non-ASEAN, Cina. Tema utama dalam festival ini adalah penurunan pamor seni pewayangan dalam masyarakat.

Di Singapura, Wayang pernah populer pada 1940-an dan 1950-an. Namun masyarakat kini lebih tertarik pada film dan televisi. Saat ini sulit mencari perajin wayang di Singapura, sehingga akhirnya sang seniman wayang sendiri yang membuatnya. Bagi orang Kamboja, wayang merupakan bentuk tradisi budaya yang berakar kuat di Kamboja. Perang yang terjadi hampir dua dekade, terutama ketika rezim Khmer berkuasa pada 1975-1979, membuat banyak tradisi hilang, termasuk wayang kulit. Kamboja kini masih berusaha mengembalikan pamor wayang seperti dulu. Wayang juga kurang populer di Brunei Darussalam. Wayang Asik, dengan bentuknya yang sebesar bungkus rokok itu, kini sulit ditemukan. Padahal, Wayang Asik merupakan wayang asli dari Brunei. Di Filipina, wayang tidak populer. Filipina tidak memiliki kisah epik hebat yang terkenal dan memengaruhi banyak orang

seperti Ramayana. Akhirnya, pertunjukan wayang pun mengadopsi cerita dari negara lain, seperti *Noh* di Jepang atau mengembangkan cerita rakyat. Bahkan Filipina terinspirasi oleh wayang golek dari Indonesia. Wayang Filipina mulai digalakkan di SMA. Mereka membuat pertunjukan dan ada yang meneruskannya hingga menjadi profesional. Wayang digiatkan oleh berbagai kalangan, mulai dari seniman, guru, hingga mahasiswa. Tak ada kebijakan dari pemerintah untuk mengembangkan wayang.

Pada akhirnya pertunjukan wayang di ASEAN menghadapi kendala utama yang sama, yaitu eksistensi lantaran makin beragamnya pilihan hiburan, Namun karakteristik masalah pada masing-masing negara berbeda-beda. Misalnya di Indonesia, permasalahannya ada pada penontonnya, sementara pendukung seni pertunjukan wayang (sekolah, sanggar, institusi pedalangan) sudah banyak tersedia. Di Malaysia, pertunjukan wayang oleh sebagian orang masih dianggap syirik. Namun berbeda dengan negara lain, Vietnam lebih beruntung karena mendapat dukungan dari pemerintahnya.

## Kesimpulan

Salah satu peranan Komunitas Sosial Budaya ASEAN adalah membangun identitas ASEAN (poin kelima dari cetak biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN). Wayang merupakan salah satu identitas masyarakat Asia Tenggara, karena hampir semua negara di wilayah tersebut mengenal kesenian wayang. Turunnya minat masyarakat dalam menonton pertunjukan wayang, mengilhami Sena Wangi Indonesia membuat Festival Wayang ASEAN, yang bertujuan sebagai ajang apresiasi,

media bertukar informasi dan mencari solusi di bidang yang sama, yaitu seni pertunjukan wayang. Pertukaran informasi inilah yang membuka pintu masing-masing negara untuk saling menerima dan mengakui kebudayaan yang berbeda. Sebagai bentuk *soft-power diplomatic*, Festival Wayang ASEAN juga mempermudah proses kerja sama antar sesama anggota ASEAN.

**Daftar Pustaka**

Grehenson, Gusti (2013). *Wayang Ditinggal Generasi Muda*. http://ugm.ac.id/en/berita /7928 - wayang.ditinggal.generasi.muda. 7 Desember 2014

Sekretariat ASEAN. 2009. *Road Map for An ASEAN Community 2009-2015. Sekretariat ASEAN*. Jakarta.

Soedarsono, R.M. 1998. *Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi*. Jakarta: Depdikbud

Soedarsono, R.M. 2003. *Seni Pertunjukan dari Perspektif Politik, Sosial, dan Ekonomi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Wibisono, R (2014). *Pergelaran Wayang: Wayang ASEAN dan Tiongkok Tampil di Solo*. http://www.solopos.com/2014/09/18/pergelaran-wayang-wayang-asean-dan-tiongkok-tampil-di-solo-537043. 7 Desember 2014.

# EKSPEDISI CHENG HO DI ASIA TENGGARA

## Pendahuluan

Jika dijelaskan secara singkat, Kenneth R. Hall (2006), dalam tulisannya membahas tentang beragam jenis persebaran diaspora di daerah kepulauan Asia Tenggara pada masa sebelum dan sesudah terjadinya kontak dengan bangsa Eropa, dalam sebuah pergeseran sudut pandang yang menimbulkan masalah etnis dan urbanisme, dan bagaimana keduanya terkait. Tulisannya mencermati pola pergerakan pendatang yang melalui wilayah Asia Tenggara, dan menekankan pada studi perencanaan kota yang diperkirakan bergantung pada pergeseran arus penduduk, dan bukan pada kelompok mayoritas penduduk di satu tempat pada satu waktu yang menghasilkan penyesuaian dengan berbagai ukuran. Hall berargumen bahwa abad kelima belas adalah masa yang penting bagi perubahan struktur masyarakat Asia Tenggara, di mana diplomasi-diplomasi politik, misi perdagangan, dan perpindahan penduduk secara regional maupun negara, saling bersilangan dan berinteraksi untuk menciptakan dunia yang tidak pernah ada sebelumnya.

Berbeda dengan Hall, ulasan ini hanya menitik-beratkan pada permasalahan perjalanan Laksama Cheng Ho yang dibahas dalam tulisan Hall tersebut, dan sedikit gambaran mengenai kondisi masyarakat Asia Tenggara pada masa awal

abad kelima belas. Laksamana Cheng Ho banyak dikenal oleh masyarakat di Indonesia, khususnya orang Cina Muslim. Salah satu peninggalan yang cukup dikenal adalah Klenteng Sam Po Kong di Semarang, Jawa Tengah.

**Masyarakat Asia Tenggara Sebelum Abad Kelima Belas**

Sebelum abad kelima belas, di wilayah Asia Tenggara sudah biasa menjadi tempat interaksi bagi orang-orang dari kawasan Cina dan India. Asia Tenggara merupakan kawasan strategis dalam memainkan peranan penting dalam bidang perniagaan maritim. Rute perdagangan meliputi seluruh kawasan kepulauan, hingga muncul kebijakan Dinasti Ming, yang menimbulkan lonjakan aktivitas maritim Cina pada abad ke-15. Kurun waktu tersebut telah mengubah Asia Tenggara dan memungkinkannya menjadi pemeran penting dalam perdagangan dunia. Pedagang-pedagang mulai berdatangan dan melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar. Di antara para pedagang tersebut, terdapat pedagang Arab, Persia, dan Gujarat yang umumnya beragama Islam. Mereka mengenalkan agama dan budaya Islam kepada para pedagang lain maupun kepada penduduk setempat.

Sebelum munculnya perniagaan maritim, bangsa Cina, India, dan Eropa melakukan kegiatan perdagangan melalui rute darat yaitu jalur sutera. Ketika dirasakan rute ini sudah mulai tidak aman, para pedagang dan saudagar kemudian mencari jalur alternatif, yaitu melalui jalur pelayaran. Melalui jalur ini, mereka bisa menempuh perjalanan dengan lebih cepat, dan barang dagangan  cepat terjual.

Hubungan dagang Asia Tenggara dapat dilihat dengan jelas dan diawali pada hubungannya dengan Cina. Penggerak

utama masa perniagaan di Asia Tenggara ialah sewaktu berkuasanya Dinasti Ming di Cina. Sebelum abad kelima belas, Cina menutup diri dengan tidak melakukan perdagangan dengan sembarangan, hanya wilayah yang mau tunduk pada Cina saja yang boleh berdagang dengan Cina. Pada 1406, Cina mengirimkan sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Tujuan dari Ekspedisi ini ialah untuk menjalin hubungan baik dengan negeri-negeri di sekitar Cina, termasuk Asia Tenggara.

Di Asia Tenggara terdapat salah satu Bandar yang cukup ramai dan besar yaitu Bandar Malaka. Bandar merupakan tempat berlabuhnya kapal-kapal atau persinggahan kapal-kapal dagang. Bandar juga merupakan pusat perdagangan, bahkan juga digunakan sebagai tempat tinggal para pengusaha perkapalan. Para pedagang di dalam kota mempunyai perkampungan sendiri-sendiri yang penempatannya ditentukan atas persetujuan dari penguasa kota tersebut. Mereka tinggal di tempat-tempat tersebut dalam waktu yang lama, untuk menunggu datangnya angin musim. Pada saat menunggu inilah, terjadi pembauran antar pedagang dari berbagai bangsa serta antara pedagang dan penduduk setempat. Terjadilah kegiatan saling memperkenalkan adat-istiadat, budaya bahkan agama. Bukan hanya melakukan perdagangan, bahkan juga terjadi asimilasi melalui perkawinan. Dalam perkembangannya, bandar-bandar tersebut umumnya tumbuh menjadi kota bahkan ada yang menjadi kerajaan, seperti Perlak, Samudra Pasai, Palembang, Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Banjarmasin, Gowa, Ternate, dan Tidore.

Komoditi yang diperdagangkan di Asia Tenggara ini bermacam-macam mulai dari cengkeh, pala, lada, beras, kayu, dsb. Pada abad kelima belas hingga tujuh belas, terdapat kekhususan perdagangan di tiap-tiap wilayah, seperti Maluku menghasilkan cengkeh, Banda menghasilkan pala, Sumatera dan Banten menghasilkan Lada, pedalaman Jawa dan Ayuthya menghasilkan beras dan kayu. Komoditi barang tersebut diangkut dengan menggunakan kapal. Kapal-kapal yang mengangkut barang dagang itu meliputi kapal Cina, Arab, Persia dan India. Kapal-kapal pada waktu itu belum menggunakan mesin seperti sekarang. Kapal-kapal tersebut masih menggunakan sistem angin sehingga harus pada musim. Pelayaran yang bergantung pada sistem angin ini membuat pelayaran ke Asia Tenggara memiliki pola-pola yang tetap. Angin musim timur terjadi dari bulan April dan bertiup dari selatan, sedangkan angin musim barat dimulai pada bulan September dan bertiup dari arah utara.

**Ekspedisi Cheng Ho di Samudera Hindia**

Sebagai sebuah ekspedisi, perlu kiranya untuk dianalisis terlebih dahulu diplomasi politik Dinasti Ming dalam mengutus Cheng Ho berlayar ke Samudra Hindia. Pertama untuk melancarkan politik kerukunan dan persahabatan dengan negara-negara asing. Dan yang kedua, mendorong perniagaan antara Tiongkok dengan negara-negara asing. Berdasarkan politik luar negeri tersebut, maksud dari pelayaran ke Samudra Hindia adalah untuk propaganda kejayaan Dinasti Ming, menyebarluaskan pengaruh politiknya di Asia-Afrika dan sekaligus mendorong maju perniagaan antara Cina dengan negara-negara lain.

Demi memperluas hubungan perniagaan dengan bangsa yang lain, Dinasti Ming membekali beberapa pemenuhan kebutuhan yang diperlukan dalam perjalanan Cheng Ho. Yang pertama, mengingat sering munculnya bajak laut dalam perjalanannya, maka armada Cheng Ho dilengkapi degan kapal penempur dan awak kapal yang bersenjata. Dihancurkannya Chen Zuyi, bajak laut Palembang, oleh armada Cheng Ho merupakan salah satu cara untuk membela diri. Dalam menyelesaikan tugasnya, Cheng Ho bukan tidak pernah menggunakan kekuatan kekerasan, namun tindakan militer yang diambil Cheng Ho hanya bermaksud untuk menyingkirkan kekuatan yang menghalangi kegiatan perniagaan.

Kedua, hingga awal abad ke-15, Cina bukan hanya sudah bersatu tetapi juga telah menjadi suatu negara yang amat kuat. Penguasa di Cina, Dinasti Ming, sedang membutuhkan wangi-wangian, rempah-rempah, zat pewarna, manik-manik, dan mutu manikam. Perdagangan dengan luar negeri akan mungkin dilakukan jika perekonomian Dinasti Ming cukup kuat, dan ekspedisi pelayaran Cheng Ho mendapatkan bekal material yang baik.

Ketiga, Dinasti Ming memerlukan terjalinnya hubungan erat antara Cina dengan negara-negara Asia-Afrika dalam jangka waktu lama. Perniagaan antara Cina dengan negara-negara itu semakin banyak, baik di tingkat pemerintah maupun di kalangan para pedagang. Semuanya itu telah menyediakan banyak pengalaman dan awak kapal kawakan yang amat berguna untuk pelayaran Cheng Ho ke Samudra Barat.

Dan yang keempat, sejak Dinasti Yuan (1206-1368M) yang kemudian diganti oleh Dinasti Ming, kepandaian

membuat kapal dan pelayaran di Cina sudah cukup tinggi, antara lain sudah dapat dibuat kapal yang terdiri atas 50-60 kabin dan mampu membawa lebih dari 1000 penumpang dalam pelayaran jauh. Jangkarnya begitu besar dan berat sehingga diperlukan 200-300 orang bila hendak mengangkatnya. Di kapalnya tersedia pula peta laut dan kompas, di samping buku yang berisi pengalaman pelayaran awak kapal Cina ke luar negeri pada masa silam.

Beberapa peristiwa penting dalam perjalanan armada Cheng Ho di Asia Tenggara. Pertama, ketika Cheng Ho dan awak kapalnya mendarat di bekas daerah kekuasaan Raja Timur di Pulau Jawa dan mengadakan pertemuan dan perdagangan dengan perantau Tionghoa, lebih dari 170 awak kapal Cheng Ho dibunuh oleh Raja Barat yang telah berhasil menggulingkan Raja Timur. Karena Raja Barat menyadari kesalahannya, diutuslah orangnya menghadap Kaisar Ming untuk memohon ampun. Utusannya berjanji akan memenuhi tuntutan Kaisar Ming dengan mengganti rugi sebanyak emas 60.000 *tail*. Dan dijanjikan pula supaya putra Raja Timur akan dijadikan sebagai Raja Timur, dan daerah kekuasaan Raja Timur tidak akan diganggu lagi oleh Raja Barat. Raja Jawa setiap satu atau dua tahun sekali menyerahkan upeti kepada Kaisar Cina dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua, bajak laut Chen Zhuyi yang digiring dari Palembang ke Tiongkok. Pada awal Dinasti Ming (1368-1644) sudah ada orang-orang Tionghoa merantau ke Palembang antara lain Liang Daoming yang berasal dari Nan Hai, Provinsi Guandong. Pada tahun 1407, armada Cheng Ho tiba di Palembang dalam perjalanan pulang ke Tiongkok. Oleh Chen Zhuyi kedatangan Cheng Ho itu dianggap sebagai kesempatan

baik untuk merampas segala harta di atas armadanya. Dan yang ketiga, adalah perang antara Kerajaan Samudra Pasai dengan Kerajaan Nakur. Pada tahun 1413, armada Cheng Ho berlayar ke Samudra Barat untuk keempat kalinya. Mula-mula berkunjung ke Campa, kemudian berturut-turut berkunjung ke Jawa, Palembang, Malaka, Aceh, dan sebagainya. Pada waktu itu Raja Samudra Pasai di Aceh meninggal dalam suatu pertempuran dengan Raja Nakur di Batak.

**Kesimpulan**

Dalam artikelnya, Hall berargumen bahwa penelitiannya tersebut telah menjawab asal mula komunitas diaspora di Samudera Hindia yang relatif terhadap pergerakan komoditas komersial, konfrontasi antara budaya asing, pembentukan masyarakat plural, loyalitas ganda, afiliasi, dan demonstrasi globalisasi di periode awal. Menurut kesimpulannya, ekspedisi Laksama Cheng Ho merupakan upaya untuk menyatukan masyarakat dunia, khususnya wilayah Samudera Hindia. Argumen ini diperkuat berdasarkan lokalisasi komunitas Muslim di Cina Selatan, yang merupakan dasar untuk memahami Cheng Ho, yang secara luas dihormati, dan bahkan didewakan sebagai pahlawan Cina di era Ming. Ekspedisi Cheng Ho telah membawa banyak negara secara bersama-sama ke tatanan politik dan ekonomi "global", yang tunduk pada pembatasan Cina, yang didefinisikan sebagai komunitas Samudra Hindia baru.

Kajian ini mirip dengan teori pasca-kolonial terbaru, yang bergerak dari studi tentang dualitas untuk mempelajari pluralisme, dari isu dominasi terhadap isu-isu ras, etnis, gender, budaya, dan masyarakat. Dalam studi diaspora, hal ini

membedakan populasi etnis tunggal dan titik awal referensial umum, pada kurun waktu tertentu. Diaspora Cina, diaspora Gujarati, diaspora Jawa, dan lain sebagainya, masing-masing telah dibahas dalam hal komposisi etnis dan basis pemukiman di berbagai perubahan sikap pada awal abad keenam belas. Hal ini membuktikan bahwa pada abad kelima belas di seluruh kawasan Asia Tenggara ada berbagai komunitas diaspora pemukiman, beberapa di antaranya dikelola berdasarkan daerah asal etnis mereka, yang terintegrasi ke dalam masyarakat lokal.

Selama abad kelima belas masyarakat Cina mempertahankan keunikan mereka sebagai orang Cina, dengan tetap menjaga hubungan mereka dengan "negara Cina," karena masih terus mendapat kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pasar Cina. Hingga akhirnya pada abad keenam belas ketika orang Eropa tiba di Nusantara, mereka bersekutu satu dengan yang lain, dengan strategi memecah dan menguasai, sehingga memisahkan masyarakat, terutama dari elite pengadilan tradisional berbasis daratan.

**Daftar Pustaka**

Hall, Kenneth R. 2006. "Multi-Dimensional Networking: Fifteenth-Century Indian Ocean Maritime Diaspora in Southeast Asian Perspective." dalam *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. 49, No. 4, MaritimeDiasporas in the Indian Ocean and East and Southeast Asia (960-1775), halaman 454-481.

Maulana, Rezza. 2010. *Muslim Tionghoa*. IMPULSE: Yogyakarta.

Reid, Anthony. 1999. *Dari Ekspansi hingga Krisis: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450-1680*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

Yuanzhi, Kong, Prof. 2007. *Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara*.

# INDOCINA: KAJIAN SEJARAH POLITIK IDENTITAS

## Pendahuluan

Indocina Prancis, atau hanya dikenal dengan nama Indocina, adalah negara koloni bentukan Prancis. Kelompok negara ini pertama kali berdiri pada tahun 1887, dan dibubarkan pada tahun 1954. Anggota koloni Indocina ini antara lain; Vietnam, yang terdiri dari Tonkin (Vietnam Utara), Annam (Vietnam Tengah), dan Cochinchina (Vietnam Selatan); Kamboja; Laos; dan Kouang-Tchéou-Wan (Guangzhouwan). Negara yang disebutkan terakhir bergabung dengan Indochina pada tahun 1900, Laos bergabung pada tahun 1893, sedangkan negara yang lain bergabung lebih awal, yaitu 1887. Pusat kota administrasi Indocina berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Awalnya berada di Saigon (Cochinchina), kemudian dipindah ke Hanoi (Tonkin) pada tahun 1902, lalu ke Da Lat (Annam), hingga akhirnya kembali ke Hanoi pada tahun 1945.

Dalam komposisi budaya, mayoritas etnis yang berada dalam wilayah koloni Indocina adalah Khin (Vietnam), Khmer (Kamboja), dan Lao (Laos). Sedangkan etnis minoritas yang berada dalam koloni ini antara lain Muong, Tay, Cham, Han, Jarai, dsb. Meskipun Prancis membawa misi agama Kristen dalam kedatangannya ke wilayah Indocina, namun agama mayoritas yang berkembang di wilayah adalah agama

Buddha (Mahayana - Confusianisme di Vietnam, dan Theravada di Laos & Kamboja). Penggunaan bahasa Prancis dalam wilayah koloni ini hanya diperuntukkan sebagai bahasa resmi pendidikan, pemerintahan, ekonomi, dan media massa.

Setelah Perang Dunia Kedua (PD II), Indocina resmi dibubarkan. Hal ini ditandai perjanjian Jenewa 1954, yang memberikan hasil kemerdekaan bagi Vietnam, dan dilepaskannya Laos dan Kamboja oleh Prancis hingga berdiri menjadi negara yang berdaulat.

Berdirinya Indocina Prancis memberikan dampak langsung bagi identitas ketiga negara Asia Tenggara tersebut (Vietnam, Laos, dan Kamboja). Efek ini yang juga mempengaruhi pembentukan jati diri yang memiliki rasa kebersamaan dalam satu kelompok, sekaligus yang membedakannya dengan kelompok yang lain. Dalam hal ini, Prancis sebagai aktor/agen perubahan, mempunyai peranan yang penting, sehingga memberikan dampak dalam kebijakan ketiga negara tersebut yang terkesan anti-kolonialisme.

**Identitas Indocina**

Sebelum membahas mengenai identitas Indochina, ada baiknya mengetahui kajian identitas menurut Stuart Hall. Teori ini bertolak dari kajian tentang penolakan identitas orang-orang kulit hitam (Afrika) terhadap label yang diberikan oleh orang-orang kulit putih (Eropa). Teori Stuart Hall menyusun teori yang menghasilkan konsep atau definisi baru berdasarkan pemahaman tentang karakter traumatis dari pengalaman penjajahan.

Setidaknya ada 2 (dua) cara yang berbeda dalam memandang identitas. Cara yang pertama mendefinisikan

identitas sebagai suatu kesatuan, sebuah kumpulan tentang kebenaran seseorang, yang menyembunyikan atau menonjolkan sesuatu tentang dirinya di mana unsur sejarah bersatu di masa sekarang. Dengan definisi ini, identitas mereferensikan pengalaman sejarah dan kode-kode budaya yang memiliki andil dalam pembentukan seseorang, dengan kerangka yang stabil, tidak berubah dan tetap dalam referensi dan makna tertentu.

Cara kedua yang disusun Stuart Hall untuk melihat identitas adalah melihat beberapa kesamaan sekaligus perbedaan yang membentuk citra diri seseorang sekaligus perbedaan yang membentuk "citra dirinya yang sesungguhnya," dibandingkan "dia telah menjadi apa." Identitas dalam cara pandang kedua ini adalah mengenai masalah akan menjadi apa, dan siapa dia sekarang. Identitas menjadi bagian dari masa depan, dan juga masa lalu. Identitas datang dari suatu tempat, memiliki sejarah, secara konstan berubah. Identitas adalah permainan dari sejarah, budaya dan kekuasaan. Identitas adalah nama yang diberikan dengan cara berbeda di mana dia diposisikan, dan diposisi mana dia berada di masa lalu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, teori Stuart Hall memandang sebuah identitas sebagai pilihan antara yang dalam konteks kestabilitasan (*being*) atau konteks perubahan (*becoming*). Dua hal tersebut yang akan menjadi acuan dalam memandang pengambilan kebijakan ketiga negara Indocina dalam membentuk identitas negaranya masing-masing.

**Identitas Vietnam**

Berbicara mengenai Prancis di Vietnam, berarti berbicara panjang mengenai perjuangan orang Vietnam dalam melawan masuknya pengaruh Barat di wilayah mereka. Sebelum Prancis masuk di Vietnam, sebenarnya Portugis telah menegakkan hubungan dagang teratur di kedua wilayah tersebut, yaitu Annam dan Tonkin sebelum abad ke-16. Selain usaha dagang, Portugis juga melakukan penyebaran agama Katolik. Misionaris Katolik Portugis yang mengawali penyebaran agama adalah berkata usaha Alexander of Rhodes tahun 1625 yang berhasil mengirim misi ke Cochinchina dan Tonking. Namun, usaha penyebaran agama ini selalu mengalami kegagalan, bahkan pada tahun 1630 misi tersebut diusir oleh Trinh Trang. Selain itu juga diadakan pengiriman misi ke Tonking berada di bawah pimpinan Francisco Bussoni. Berkat perlindungan Sai Vuong (1613-1635), misi di bawah pimpinan Francisco Bussoni tersebut bisa menyingkir ke daerah Annam hingga tahun 1639. Berkat Alexander of Rhodes itu pulalah Prancis tertarik untuk mengirimkan misionaris ke wilayah Vietnam dengan jalan menyamar atau bertindak sebagai pedagang yang bekerja pada C*ompagnie Des Indes Orientaux* (Perusahaan India Timur). Kemudian pada tahun 1662, Prancis mendirikan Societe des Missions Etrangers (Masyarakat Misi Luar Negeri), yang berpusat di Ayut'ia. Dari Ayut'ia inilah dilakukan pengiriman misi ke Kamboja, Annam, dan Tonking. Akan tetapi misionaris Prancis ini selalu mengalami kegagalan, karena beberapa faktor, antara lain: (1) adanya penolakan dan perlawanan, pengejaran, penahanan, penyiksaan bahkan pembunuhan dari raja-raja setempat terhadap para misionaris dan pengikut Katolik, (2) larangan para misionaris melibatkan diri dalam urusan perdagangan dari Gereja Katolik Roma

pada tahun 1682, (3) terjadinya pertentangan antar aliran misionaris, dan (4) kurangnya tenaga dan sarana dalam penyebaran agama Katolik.

Pada masa pemerintahan Nguyen Hoang, di kerajaan Annam, pada tahun 1773 terjadi pemberontakan Tay-Son. Pemberontak ini dipimpin oleh tiga bersaudara yang masing-masing bernama Nguyen Van Nhac, Nguyen Van Lu, dan Nguyen Van Hue. Pada tahun 1782 para pemberontak telah berhasil menguasai Saigon, Hue, Cochinchina dan mengadakan pengejaran serta pembunuhan keluarga raja Nguyen-Hoang. Di antara keluarga kerajaan yaitu Nguyen Phuc-Anh, seorang putra mahkota kerajaan yang baru berusia 15 tahun, pada tahun 1785 berhasil lolos dan melarikan diri ke Ayut'ia. Dalam pelarian ke Ayut'ia inilah Nguyen-Anh bertemu dengan Pigneau de Bahaine, seorang pendeta Nasrani yang sedang mengadakan misi penyebaran Katolik di Ayut'ia. Berkat pendidikan dan bantuan atau perantaraan Pigneau de Bahaine, Nguyen-Anh dapat bekerja sama dengan Prancis, sehingga terjadi perjanjian antara Nguyen-Anh dengan Prancis. Isi perjanjian tersebut secara garis besar adalah: Prancis bersedia memberi bantuan kapal-kapal perang, tentara dan pasukan dengan syarat pulau Condore dan Teluk Tourane diserahkan kepada Prancis.

Dengan bantuan Prancis, Nguyen-Anh berusaha merebut kembali kekuasaan keluarga Nguyen dan berhasil mengalahkan para pemberontak Tay-Son serta menyatukan kerajaan Annam kembali. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1802 ia mengangkat dirinya sebagai penguasa Vietnam di Hue dengan gelar Gia-Long hingga tahun 1820. Nguyen-Anh inilah dikenal sebagai pendiri dinasti Nguyen yang berkuasa sampai

tahun 1945 yang berkuasa atau kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Vietnam.

Di bawah pemerintahan Gia Long (1802-1820) agama Katolik Roma dapat berkembang dengan leluasa. Pengganti-pengganti Gia Long, antara lain: Minh Mang (1820-1840), Thieu Tri (1840-1847), dan Tu Duc (1847-1883), semuanya anti-Khatolik Roma dan mencoba melakukan perlawanan. Perlawanan inilah yang justru menyebabkan penyerangan Prancis, dan ini terjadi pada masa pemerintahan Tu Duc. Tu Duc yang memerintah Vietnam dari tahun 1847-1883, menindas kaum Katholik dan mencoba menutup wilayahnya bagi bangsa asing. Dengan alasan untuk melindungi warga negaranya, Prancis menyerbu Cochinchina pada tahun 1858. Tentara Vietnam dapat dikalahkan, tetapi Prancis gagal dalam serbuannya ke Hue, ibukota Vietnam. Perang ini berlangsung selama 4 tahun (1858-1862). Pada tahun 1862, terjadilah Perjanjian Saigon yang memuat: (1) bagian timur Cochinchina menjadi milik Prancis, (2) pelabuhan-pelabuhan Tourane, Balat, Kuang-An, dibuka untuk Prancis, dan (3) kebebasan beragama Katolik Roma.

Pada masa itu pula, terjadi kesalahan politik yang dilakukan Tu Duc. Pada tahun 1873-1874, Francis Garnier, seorang petualang Prancis, atas kehendaknya sendiri menyerbu Tongking dan menduduki Hanoi, namun tindakannya dapat dikalahkan oleh tentara Vietnam. Dengan segera Prancis menawarkan penyelesaian soal Hanoi ini. Terjadilah Perjanjian Saigon pada tahun 1874 yang ternyata sangat merugikan pihak pemenang, yaitu Vietnam. Perjanjian ini memuat: (1) Hanoi dikembalikan oleh Prancis kepada Vietnam, (2) Vietnam mengakui Cochinchina seluruhnya sebagai milik Prancis, dan (3)

Vietnam berjanji akan menyesuaikan politik luar negerinya dengan politik luar negeri Prancis.

Dengan ini imperialisme Prancis kuat kembali. Tu Duc terlambat mengetahui kesalahannya, karena itu Tu Duc memalingkan mukanya ke Cina untuk meminta pertolongan terhadap Prancis. Hal ini menyebabkan Prancis menuduh Tu Duc melanggar perjanjian Saigon 1874. Timbullah perang antara Vietnam dan Prancis, yang menyebabkan kekalahan Vietnam. Lalu muncul Perjanjian Hue 1883, yang menetapkan bahwa Vietnam mengakui naungan Prancis atas dirinya. Vietnam telah kehilangan kemerdekaannya. Pada tahun 1883 itulah Tu Duc wafat dan timbullah perebutan mahkota Vietnam. Pada tahun 1887 Vietnam berada di bawah wilayah kekuasaan Prancis.

Dalam menjalankan kekuasaannya, Prancis menerapkan politik asimilasi. Prancis berusaha menghilangkan kebudayaan asli Vietnam. Orang-orang Vietnam diwajibkan untuk berbahasa Prancis dan hidup dengan cara orang Prancis. Namun, usaha ini tidak berhasil, karena Prancis ragu-ragu dalam memperluas pendidikan di Vietnam, muncul kekhawatiran timbulnya nasionalisme dari kaum terpelajar. Prancis juga mengeksploitasi besar-besaran segala kekayaan alam untuk kepentingan dirinya sendiri. Segala pembangunan dan modernisasi dijalankan untuk kepentingan Prancis. Pertanian di Vietnam dimodernisasi, hal ini demi seimbangnya ekonomi Vietnam yang pada saat itu hanya mengandalkan satu sektor pertanian beras itu sendiri. Sungai Mekong dibangun untuk memperkukuh ekonomi, tambang-tambang dibuka. Tetapi semuanya hanya untuk Prancis semata, bukan untuk rakyat Vietnam.

Munculnya gerakan perlawanan dan nasionalisme di Vietnam di awal tahun 1900-an, merupakan wujud dari sikap anti dominasi asing yang semena-mena, mengeksploitasi kekayaan alam demi kepentingan sendiri, dan ingin menguasai tanah jajahannya. Sebab-sebab meluapnya kembali nasionalisme di Vietnam adalah: (1) penindasan Prancis di Vietnam, baik politik maupun ekonomi, (2) timbulnya kaum terpelajar yang telah mempelajari demokrasi tetapi dilarang mempraktikkannya, (3) Perang Jepang-Rusia pada 1905 yang membangkitkan nasionalisme di seluruh Asia, (4) Revolusi Nasional Tiongkok pada 1911 yang memperkuat keinginan untuk merdeka, (5) dalam Perang Dunia I, Prancis mengirimkan orang-orang Indocina ke Eropa sebagai tentara dan pekerja perang. Kembali mereka ke Indochina membawa paham-paham liberalisme.

Gerakan nasionalisme perjuangan Vietnam muncul sebagai senjata makan tuan bagi Prancis yang menjalankan politik asimilasi, sehingga muncullah kaum-kaum intelektual. Munculnya kaum intelektual di Vietnam menjadikan kesadaran akan nasionalisme yang diwujudkan dalam organisasi-organisasi politik. Tiap organisasi politik mempunyai ideologi yang berbeda dan dalam perkembangannya menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara kaum nasionalis dan komunis.

Setelah jatuhnya Prancis selama Perang Dunia II, wilayah koloni diberikan kepada pemerintah Vichy dan berada di bawah pendudukan Jepang hingga Maret 1945. Sejak awal Mei 1941, Viet Minh, tentara komunis yang dipimpin oleh Ho Chi Minh, mulai melakukan pemberontakan melawan Jepang. Pada bulan Agustus 1945 mereka mendeklarasikan

kemerdekaan Vietnam dan memperpanjang perang, yang dikenal sebagai Perang Indocina Pertama, melawan Prancis.

Keputusan Prancis untuk mengembalikan kekuasaan kolonial di Vietnam menyebabkan perundingan menjadi mustahil. Setelah konflik senjata di Haiphong pada akhir 1946, berlangsung perang gerilya selama 8 tahun antara Viet Minh yang dipimpin komunis di satu pihak, dan Prancis serta sekutu nasionalis anti komunis mereka di pihak lain. Setelah Prancis menderita kekalahan di Dien Bien Phu pada Mei 1954, Prancis dan Inggris, China, Uni Soviet, dan Amerika Serikat, serta pemerintah Viet Minh dan Bao Dai bertemu di Jenewa, Swiss, untuk mengadakan perundingan damai.

Pada 29 Juli 1954, Perjanjian Penghentian Permusuhan ditandatangani Prancis dan Republik Demokratik Vietnam. Pemerintahan kolonial Prancis di Vietnam pun berakhir. Adapun isi dari Perjanjian Genewa berisi kesepakatan dengan 6 bab dan 47 pasal. Secara garis besar dapat disimpulkan yaitu: (1) mengakui kemerdekaan penuh Kamboja, Laos, dan Vietnam, (2) pembagian Vietnam menjadi dua (Utara dan Selatan), (3) Prancis dan Republik Vietnam Selatan menarik pasukan yang ada di Utara, (4) Republik Demokrasi Vietnam harus pula menarik pasukan dari seluruh Vietnam, (5) Republik Demokrasi Vietnam yang menguasai daerah Utara diakui secara *de facto*, dan (6) untuk penyatuan Vietnam akan diadakan pemilu pada bulan Juli 1956 di bawah pengawasan Komisi Pengawas Internasional.

Perjanjian Jenewa 1954 memerintahkan gencatan senjata antara pasukan komunis dan nasionalis anti-komunis. Wilayah Vietnam dibagi menjadi dua, yakni Utara (komunis) dan Selatan (non-komunis). Perjanjian Jenewa juga

memerintahkan dilaksanakannya pemilihan umum sebelum Juli 1956 untuk menyatukan utara dan selatan dalam sebuah pemerintahan. Namun, pemerintah Vietnam Selatan menolak diadakannya pemilihan umum. Pada 26 Oktober 1955, Vietnam Selatan mendeklarasikan diri sebagai Republik Vietnam.

Setelah 1954, para pemimpin komunis Vietnam Utara mengkonsolidasikan kekuatan mereka dan melaksanakan program reformasi agraria. Selama periode ini, sekitar 450.000 orang, termasuk sejumlah umat Katolik Vietnam melarikan diri dari Utara ke Selatan. Sementara itu, beberapa orang mantan pejuang Viet Minh pindah ke Utara. Pada akhir 1950-an, para pemimpin Vietnam Utara mengaktifkan kembali jaringan gerilya komunis yang masih tersisa di Selatan. Para pejuang yang disebut Viet Cong tersebut diam-diam dibantu oleh pihak Utara.

Pasca perjanjian Jenewa, kekuasaan Prancis di Vietnam praktis sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah negara bentukan Vietnam Selatan, yang pada akhirnya berhasil disatukan melalui Perang Indocina Kedua oleh Vietnam Utara yang berakhir pada tanggal 2 Juli 1976, dan menjadi sebuah negara bernama Republik Sosialis Vietnam atau yang biasanya dikenal sebagai Vietnam.

Pasca kemerdekaan ini berdampak pada komunis Vietnam yang melarang pembentukan partai-politik lain dan menahan tersangka yang dipercayai melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat. Selain itu, dampak lain dari pengambilalihan kekuasaan adalah kampanye massal mengenai kolektivitas pertanian dan pabrik-pabrik.

Rekonstruksi negara yang porak poranda akibat perang berlangsung sangat lambat. Selain itu, efek perang seperti masalah kemanusiaan dan masalah-masalah ekonomi yang sangat serius dihadapi oleh rezim komunis.

Pada 1978, militer Vietnam melakukan invasi terhadap Kamboja. Invasi tersebut dilakukan untuk membebaskan rekan mereka, Khmer Merah, dari penindasan. Aksi ini semakin memperburuk hubungan dan mengakibatkan serangan mendadak terhadap Vietnam Utara pada 1979. Konflik ini mengakibatkan Vietnam semakin bergantung pada bantuan ekonomi dan bantuan militer dari Uni Soviet.

Pada 1986, Partai Komunis Vietnam mengimplementasikan reformasi pasar bebas (*free market*). Reformasi pasar bebas ini dikenal dengan nama Doi Moi (Renovasi). Program tersebut membuat kekuasaan negara tetap tak tertandingi. Selain itu, kepemilikan pribadi atas pertanian dan perusahaan-perusahaan dilakukan deregulasi dan investasi asing dilaksanakan. Walaupun begitu, kekuatan Partai Komunis Vietnam atas semua aspek pemerintahan tetap dipertahankan.

Dari uraian panjang mengenai sejarah kemerdekaannya, identitas Vietnam dibentuk melalui perjuangan yang hebat dan melelahkan. Walaupun Prancis memasukkan beragam ideologi dan kepercayaan sewaktu masa kolonialisme, namun rakyat Vietnam tetap mempertahankan identitasnya sebagai diri yang berdaulat dan tidak bergantung pada orang lain. Pembentukan koloni Indocina Prancis dapat dipandang sebagai sikap menolak perubahan, dan tetap mempertahankan jati diri yang anti terhadap penjajahan (*being*).

## Identitas Kamboja

Sebelum masuknya Prancis di Kamboja, wilayah ini merupakan penuh dengan konflik kekuasaan. Pada tahun 1432, Khmer dikuasai oleh Kerajaan Thai. Dewan Kerajaan Khmer memindahkan ibukota dari Angkor ke Lovek, sehingga Kerajaan mendapat keuntungan besar karena Lovek adalah bandar pelabuhan. Pertahanan Khmer di Lovek akhirnya bisa dikuasai oleh Thai dan Vietnam, dan juga berakibat pada hilangnya sebagian besar daerah Khmer. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1594. Selama 3 abad berikutnya, Khmer dikuasai oleh Raja-raja dari Thai dan Vietnam secara bergilir.

Pada tahun 1863, Raja Norodom, yang dilantik oleh Thai, mencari perlindungan kepada Prancis. Pada tahun 1867, Raja Norodom menandatangani perjanjian dengan pihak Prancis yang isinya memberikan hak kontrol provinsi Battambang dan Siem Reap yang menjadi bagian Thai. Akhirnya, kedua daerah ini diberikan pada Kamboja pada tahun 1906 pada perjanjian perbatasan oleh Prancis dan Thai.

Kamboja dijadikan daerah Protektorat oleh Prancis dari tahun 1863 sampai dengan 1953, sebagai daerah dari koloni Indocina. Setelah penjajahan Jepang pada 1940-an, akhirnya Kamboja meraih kemerdekaannya dari Prancis pada 9 November 1953. Kamboja menjadi sebuah kerajaan konstitusional di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk.

Hampir sama dengan Vietnam, pemerintah kolonial Prancis juga mengembangkan perekonomian Kamboja untuk kepentingan negaranya. Perkebunan karet dikembangkan dan hasilnya diekspor untuk mengisi kas negara Prancis.

Pengaruh budaya Barat juga masuk dan mempengaruhi perkembangan sosial budaya orang Khmer. Walaupun budaya Barat masuk, budaya lokal yang berdasarkan pada ajaran Buddhisme tetap tumbuh dan berkembang.

Pada saat Perang Vietnam tahun 1960-an, Kerajaan Kamboja memilih untuk netral. Hal ini tidak dibiarkan oleh petinggi militer, yaitu Jendral Lon Nol dan Pangeran Sirik Matak yang merupakan aliansi pro-Amerika Serikat untuk menyingkirkan Norodom Sihanouk dari kekuasaannya. Dari Beijing, Norodom Sihanouk memutuskan untuk beraliansi dengan gerombolan Khmer Merah, yang bertujuan untuk menguasai kembali takhtanya yang direbut oleh Lon Nol. Hal inilah yang memicu perang saudara timbul di Kamboja.

Khmer Merah akhirnya menguasai daerah ini pada tahun 1975, dan mengubah format Kerajaan menjadi sebuah Republik Demokratik Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot. Mereka dengan segera memindahkan masyarakat perkotaan ke wilayah pedesaan untuk dipekerjakan di pertanian kolektif. Pemerintah yang baru ini menginginkan hasil pertanian yang sama dengan yang terjadi pada abad ke-11. Mereka menolak pengobatan Barat yang berakibat rakyat Kamboja kelaparan dan tidak ada obat sama sekali di Kamboja.

Pada November 1978, Vietnam menyerbu Republik Demokratik Kamboja untuk menghentikan genosida besar-besaran yang terjadi di Kamboja. Invasi Vietnam ini mendirikan pemerintahan melalui *People's Republic of Kampuchea* (PRK). Spontan hal ini mendapatkan reaksi yang keras dari komunitas internasional. Konflik Kamboja selanjutnya memasuki tahap internasionalisasi yang intensif, di mana tahun-tahun berikutnya perkembangan konflik diwarnai dengan pergolakan di dalam

negeri melalui pihak-pihak oposisi yang masing-masing berupaya untuk mengumpulkan kekuatan demi menjatuhkan pemerintahan PRK yang tak lain merupakan kepanjangan tangan Vietnam di Kamboja. Akhirnya, pada tahun 1989, perdamaian mulai digencarkan antara kedua pihak yang bertikai ini di Paris. PBB memberi mandat untuk mengadakan gencatan senjata antara pihak Norodom Sihanouk dan Lon Nol.

Pada tahun 1993, PBB mengadakan pemilu yang membuat Norodom Sihanouk kembali ke posisinya semula. Khmer Merah terus berupaya menciptakan kekacauan sampai akhirnya dilarang pada tahun 1994. Pada tahun 1998, Hun Sen diangkat sebagai perdana menteri Kamboja dan dianggap mampu menstabilkan kondisi. Hingga saat ini, Kamboja merupakan negara berbentuk monarki konstitusional yang dikombinasikan dengan demokrasi multi partai. Negara ini memiliki raja sekaligus perdana menteri.

Pengaruh koloni Indocina Prancis di Kamboja agaknya sedikit banyak memiliki perubahan (*becoming*). Kehadiran Prancis yang justru dapat menghadirkan kedamaian di wilayah ini, menjadi contoh bagi penguasa Kamboja selanjutnya. Dari sisi politik, Kamboja berubah dari sistem monarki, ke sistem sosialis, hingga sistem monarki konstitusional. Meskipun ideologi dan agama yang dibawa Prancis tidak berkembang di negara ini, namun penggunaan bahasa Prancis dan Inggris masih tetap digunakan.

**Identitas Laos**

Sejak tahun 1868, Prancis mengirimkan sebuah ekspedisi awal ke Laos untuk menyelidiki rute perdagangan sungai Mekong ke Cina. Pada tahun 1886, Prancis mendapat izin dari

Laos untuk memperluas pemerintahannya di Laos dengan menempatkan wakil konsulat di Luang Prabang. Dalam perang Vietnam-Prancis yang berlangsung pada 1883, pihak Vietnam mengalami kekalahan dan disepakati perjanjian Hue 1883 yang menetapkan bahwa Vietnam harus mengakui naungan Prancis atas Vietnam. Sejak itulah Prancis betul-betul berkuasa atas seluruh Vietnam dan melanjutkan perluasan imperiumnya ke wilayah Laos dan Kamboja.

Pada tahun 1887, Laos, mengantisipasi ekspansi bangsa Prancis dengan mengosongkan sebagian besar daerah Laos. Laos dapat dikuasai tanpa kendala berarti sejak 20 Januari 1893. Tahun berikutnya Kamboja dapat dikuasai. Jadi pada tahun 1894 Prancis telah mampu menguasai kawasan Indocina dan menyatakan daerah tersebut adalah daerah protektorat Prancis. Politik kolonial Prancis di Laos termasuk dalam politik Prancis yang diterapkan di kawasan Indochina. Politik kolonial Prancis secara garis besar dikonsentrasikan pada bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Dalam bidang politik, pemerintahan kolonial Prancis melakukan pengendalian kekuatan gerakan perlawanan lokal dengan politik pecah belah. Langkah utama yang dilakukan adalah pembagian teritorial Indocina. Hal ini terbukti, bahwa setelah Prancis berhasil menguasai seluruh kawasan Indocina serta dapat melumpuhkan perlawanan dan kerusuhan-kerusuhan di daerah Tonking, Cochinchina dan daerah lain, pada Oktober 1887, Prancis menentukan politik pemerintahan kolonial atas Indochina. Wilayah Annam, Tonking, Laos dan Kamboja sebagai daerah protektorat kolonial Prancis langsung di bawah kekuasaan Menteri Luar Negeri. Sejak tahun 1989 Kamboja, Conchinchina, Annam dan Tonking dijadikan sebuah

koloni Indochina. Pemerintahan yang lebih tinggi dipercayakan kepada seorang gubernur Jendral Sipil yang membawahi lima departemen. Bidang Ekonomi Prancis melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam dan penduduk Indocina. Tetapi Prancis tidak banyak tertarik dengan wilayah Laos.

Paris mengirimkan pejabat-pejabat resmi Vietnam ke Laos untuk mengatur pemerintahan, tetapi peranannya hanya sedikit dalam mengembangkan perekonomian Laos. Bidang sosial budaya, Prancis menerapkan politik asimilasi yaitu memasukkan budaya Prancis ke Indocina atau dengan kata lain mem-Prancis-kan Indocina. Namun demikian politik Prancis ini gagal karena Prancis ragu-ragu dalam memperluas pendidikan karena takut timbul nasionalisme dari kaum terpelajar.

Pada bulan September 1940, setelah Prancis diserang oleh Jerman, pasukan Jepang menduduki Indocina dengan tanpa perlawanan. Secara resmi kekuatan kolonial Prancis meninggalkan seluruh instalasi militernya untuk digunakan pasukan Jepang. Dan juga terjadi pertukaran pemerintahan kolonial Prancis secara resmi ke Jepang. Perang dunia II tidak banyak mengakibatkan kerusakan di Laos, bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, seperti Myanmar dan Filipina. Di Asia Timur, Perang dunia ke II berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945, yang ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Kemudian, Prancis mencoba mendirikan kembali kekuatan kolonialnya di Kamboja, Vietnam dan Laos.

Pada tanggal 1 September 1945, negara Laos menyatakan kemerdekaannya. Prancis menolak untuk menerima hal tersebut, dan membalas dengan mengirim

pasukannya ke Laos. Perang gerilya berawal ketika tentara Laos melawan kekuatan kolonial Prancis. Tiga orang pangeran yang terkenal melawan penjajah adalah Pangeran Souvanna Phoma, Pangeran Souphanavong dan Pangeran Oune Sananikone. Pangeran Souphanavong yang banyak berkenalan dengan paham sosialisme dan menjalin hubungan dengan Ho Chi Minh dikenal sebagai pemimpin kelompok komunis. Sebaliknya Pangeran Oune Sananikone yang lebih dekat dengan Muangthai dikenal sebagai pemimpin yang beraliran nasionalis. Sedangkan Souvanna Phoma kakak dari Souphanavong lebih mengambil jalan tengah. Terdesaknya Prancis di kawasan Indocina sebagai akibat dari perlawanan yang sangat gigih dari kelompok komunis di kawasan Indochina yang bersatu untuk mengusir imperialisme negara-negara sekutu seperti Amerika, Prancis, Inggris mengadakan konferensi Jenewa pada tanggal 25 April 1954 untuk membahas masalah Korea dan Indocina.

Dengan ketiga aliran yang ada di Laos ternyata sulit untuk membangun aliansi. Apalagi setelah kedatangan Amerika Serikat sesudah Perang Dunia II dalam rangka mempopulerkan doktrin John Foster Dulles yang anti-komunis. Perpecahan antara pemimpin Laos semakin menajam setelah Souphanavong dengan partai Pathet Lao yang beraliran komunis melancarkan serangan dan pengaruh di Laos dengan bantuan tentara Viet Minh. Sedangkan golongan kanan yang nasionalis di bawah pimpinan Sananikone menjadi lebih kaya karena bantuan Amerika Serikat. Meski kelompok nasionalis ini kurang popular dalam kepemimpinannya di Laos, tampaknya Laos lebih cenderung mengambil jalan tengah, walaupun kepopuleran golongan Pathet Lao cukup menonjol. Sehubungan

dengan itulah maka dalam perkembangannya yang berhasil dan banyak menduduki jabatan Perdana Menteri adalah Souvana Phoma. Pada waktu menduduki jabatan Perdana Menteri, Phouma terus berusaha untuk membentuk koalisi dengan adiknya Souphanavong. Dan hal ini pernah tercapai dalam tahun 1973, setelah Souvanna Phoma bersama Vongvichit dari pihak Pathet Lao membubuhkan tanda tangan di atas kertas perjanjian damai pada hari ke 23 Februari 1973.

Sejak itu Laos berangsur-angsur dikuasai oleh Pathet Lao, banyak orang, bekas pejabat pemerintahan lama dan orang-orang yang setia pada raja, berusaha mengadakan perlawanan terhadap penguasa baru. Penguasa baru Laos di samping menghadapi golongan nasionalis juga masih menghadapi serangan-serangan dari suku Meo yang tidak mau tunduk pada penguasa Pathet Lao.

Pada 1975 kaum komunis Pathet Lao yang didukung Uni Soviet dan komunis Vietnam menendang pemerintahan Raja Savang Vatthana dukungan Amerika Serikat dan Prancis. Setelah mengambil alih negara ini, mereka mengganti namanya menjadi Republik Demokratik Rakyat Laos yang masih berdiri hingga saat ini. Laos mempererat hubungannya dengan Vietnam dan mengendurkan larangan ekonominya pada akhir dekade 1980-an dan dimasukkan ke dalam ASEAN pada 1997.

Prancis tidak terlalu menanamkan ideologinya di negara Laos, kecuali kepentingannya dalam hubungannya dengan Cina. Jejak kolonialisme Prancis masih tersisa pada surat kabar berbahasa asing yang diterbitkan oleh pemerintah, yaitu: *Vientiane Times* yang berbahasa Inggris, dan *Le Rénovateur*

yang berbahasa Prancis. Selain itu, Kho San Pathet Lao, kantor berita resmi Republik Demokratik Rakyat Laos, menerbitkan surat kabarnya dalam bahasa Inggris dan Prancis. Perubahan politik dari sistem kerajaan menjadi demokratik kerakyatan menjadikan struktur pemerintahan turut berubah, yang secara tidak langsung, dipengaruhi oleh kehadiran Prancis di wilayah ini (*becoming*).

**Penutup**

Ketiga negara Indocina Prancis mempunyai sikap yang berbeda dalam pembentukan identitas bangsanya pasca lepas dari kolonialisme. Vietnam memiliki sejarah pandang membendung pengaruh asing dan tetap mempertahankannya meskipun Prancis hadir memberikan pengaruh agama dan ideologi. Pengaruh tersebut justru membuat Vietnam semakin kuat dalam pembentukan jati diri bangsanya (*being*).

Kamboja, yang di masa lalunya dibayang-bayangi kekacauan politik dan perebutan kekuasaan, dengan hadirnya Prancis justru menimbulkan kedamaian. Sehingga pola politik pada jaman kolonialisme dijadikan acuan dalam penerapan kebijakan negara yang bersangkutan (*becoming*).

Laos, yang hanya digunakan sebagai media penghubung dengan Cina, dan tidak terlalu diperhatikan oleh Prancis, menjadi ajang pertarungan tiga ideologi, yaitu komunis, liberal, dan bukan keduanya (non-blok). Meskipun pada akhirnya komunislah yang menjadi penguasa hingga saat ini, namun peranan Prancis dalam membentuk identitas bangsa Laos patut diperhitungkan, meskipun hanya sebagian kecil (*becoming*).

**Daftar Pustaka**

Abdulgani, Roeslan. 2000. *Indocina Dalam Kawasan Asia Tenggara Dewasa Ini*. Jakarta: Yayasan Indayu.

Acharya, Amitav. 2013. *The Making of Southeast Asia: International Relations of a Region*. New York: Cornell University Press

Bourotte, Bernard. *History of Mountain People of Southern Indochina up to 1945*. Washington DC: Agency fo International Development.

Brocheux, Pierre, dan Daniel Hemery. 2010. *Indochina: An Ambiguous Colonization, 1858–1954*. Califronia: University of California Press.

Draguhn, Werner. 1983. "The Indochina Coonflict and Position of The Country Involved" dalam jurnal C*ontemporary Southeast Asia*, Volume 5, Nomor 1 (Juni 1983), halaman 95-116.

Hall, D.G.E. 1988. *Sejarah Asia Tenggara*. Surabaya : Usaha Nasional

Hall, Stuart. 1990. *Cultural Identity and Diaspora dalam buku Identity: Community, Culture, Difference*. Ed. Jonathan Rutherford. London: Lawrence & Wishart.

John, Ronald Bruce St. 2006. *Revolution, Reform, and Regionalism in Southeast Asia: Cambodia, Laos, and Vietnam*. London and New York: Routledge.

Ivarsson, Søren. 2008. *Creating Laos: The Making of a Lao Space Between Indochina and Siam, 1860-1945*. Copenhagen: NIAS Press.

Leifer, Michael. 1993. "Indochina and ASEAN: Seeking a New Balance" dalam jurnal C*ontemporary Southeast Asia*,

Volume 15, Nomor 3 (Desember 1993), halaman 269-279.

Osborne, Milton. 1990. *Southeast Asia: An Illustrated Introduction History*. London: Unwin Hyman Limited.

Sudharmono. 2012. *Sejarah Asia Tenggara Modern: Dari Penjajahan ke Kemerdekaan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Tarling, Nicholas. 2001. *Imperialism in Southeast Asia: A Fleeting, Passing Phase*. London and New York: Routledge.

# *MÚA RỐI NƯỚC*: FOLKLOR TENTANG IDENTITAS VIETNAM

## Pendahuluan

Berbicara tentang folklor, tidak bisa lepas dari konsep kebudayaan di suatu wilayah. Dengan konsep kebudayaan tersebut muncul gagasan dan tindakan yang menghasilkan karya seni maupun dongeng. Menurut Koentjaraningrat (1983:182), kebudayaan adalah: keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam konteks tersebut didapatkan melalui pembelajaran turun-temurun, baik langsung maupun tidak langsung. Proses belajar ini didapatkan lewat proses komunikasi antar manusia baik dalam satu wilayah maupun dengan wilayah yang lain. Komunikasi ini yang nantinya akan menjadi salah satu titik ukur sebuah produk budaya menjadi populer dan dijadikan milik bersama atau justru hanya menjadi identitas seseorang maupun kelompok tertentu.

Salah satu tradisi tradisional yang paling terkenal di wilayah Asia Tenggara adalah seni wayang. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki pertunjukan wayang. Wayang merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang telah

mampu bertahan, dari waktu ke waktu, dengan mengalami perubahan dan perkembangan sampai berbentuk seperti sekarang ini. Daya tahan wayang yang luar biasa terhadap berbagai perubahan pemerintahan, politik, sosial budaya maupun kepercayaan membuktikan bahwa wayang mempunyai fungsi dan peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat.

Seni wayang di Asia Tenggara memiliki corak yang beraneka ragam. Ada yang terbuat dari kulit sapi, kayu, hingga rumput. Ada yang dipertunjukkan di atas panggung, dibalik layar, maupun yang dipertunjukkan di kolam air. Seni pertunjukan wayang yang disebutkan terakhir (dengan media kolam air) hanya ada satu, yaitu *Múa Rối Nước* dari Vietnam. Sebelum membahas lebih jauh mengenai *Múa Rối Nước*, akan dibahas terlebih dahulu sejarah wilayah Vietnam, guna mengetahui lebih jauh latar belakang folklor dan seni pertunjukan ini.

**Sejarah Awal Vietnam**

Jika dilihat dari area dan keanggotaannya dalam ASEAN (*Association South East Asia Nations*), Vietnam masuk ke dalam area wilayah Asia Tenggara. Namun jika dilihat dari kewilayahannya, Vietnam lebih dekat dengan wilayah kebudayaan Asia Timur. Hal ini tidak serta merta membuat Vietnam sama sekali berbeda dengan kebudayaan-kebudayaan lain di Asia Tenggara. Justru Vietnam memiliki peran penting dalam pembentukan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara dengan kehadiran sejarah kebudayaan Dong Son.

Secara geografis, Vietnam terletak di sebelah timur Semenanjung Indochina, antara 8° dan 24° Lintang Utara, dan 102° dan 110° Bujur Timur, dengan luas sekitar 331.210 km2. Negara ini berbatasan dengan Cina di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan Laut Cina Selatan di sebelah timur. Wilayah Vietnam sebagian besar berbukit dan hutan lebat. 40% luas daratan dipenuhi pegunungan, dan 42% pegunungan adalah hutan tropis. Bagian utara Vietnam sebagian besar terdiri dari dataran tinggi dan Delta Sungai Merah. Phan Xi Pang yang terletak di provinsi Lao Cai, adalah gunung tertinggi di Vietnam, yang menjulang 3.143 m (10.312 kaki). Vietnam selatan sendiri bisa dibagi menjadi pesisir dataran rendah, deretan pegunungan Annam, dan hutan yang luas. Delta Sungai Merah merupakan daerah yang datar, yang meluasnya 15.000 km2. Dibandingkan Delta Sungai Mekong, Delta Sungai Merah lebih kecil, namun lebih sering dikembangkan dan lebih padat penduduk.

Dari sensus penduduk pada tahun 2009, populasi masyarakat di Vietnam berjumlah kurang lebih 85,8 juta penduduk. Struktur masyarakat Vietnam terdiri dari 54 etnis, dengan etnis mayoritas 85,8% (73,6 juta) penduduk berasal dari etnis Kinh, dan etnis minoritas yang relatif besar lainnya adalah etnis Hmong, Dao, Tay, Thai, dan *Nung*. Bahasa nasional masyarakat Vietnam adalah bahasa Vietnam, yaitu semacam bahasa Mon-Khmer yang mayoritas digunakan oleh masyarakat bangsa ini. Pada awal sejarah, bangsa ini menggunakan karakter China sebagai media tulisnya. Pada abad ke-13, bangsa Vietnam membuat karakternya sendiri, yang dikenal dengan nama Chu Nom. Pada abad ke-17, Jesuit

Alexandre de Rhodes dan beberapa orang misionaris Katolik membuat karakter Romawi bagi masyarakat Vietnam, yang dikenal dengan nama *Quoc Ngu*, yang lebih dikenal sampai saat ini.

Bangsa Vietnam memiliki sejarah yang panjang dan keras sejak sebelum Masehi hingga akhir Perang Vietnam tahun 1975. Vietnam (Bahasa Vietnam: *Việt Nam*), bernama resmi Republik Sosialis Vietnam (*Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam*) adalah negara paling timur di Semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Cina di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya dan di sebelah timur terbentang Laut China Selatan.

Vietnam, sejak abad 11 SM sampai abad 10 Masehi mayoritas berada di bawah kekuasaan kekaisaran Cina. Tahun 939 M, Vietnam merdeka secara politis, dan mulai menggunakan Champa sebagai nama negara. Pada tahun 214 SM, beberapa tahun setelah Kaisar Qin Shihuang mempersatukan Tiongkok, ia mengirim bala tentara ke selatan Tiongkok untuk menaklukkan wilayah yang sekarang adalah Guangdong, Guangxi, Fujian dan Vietnam bagian utara. Penaklukkan itu disertai dengan penaklukkan suku kuno Bai Yue. Setelahnya, Dinasti Qin mendukung migrasi suku Han secara besar-besaran ke selatan dan membentuk tiga provinsi di selatan. Selang puluhan tahun kemudian, tahun 203 SM, Dinasti Qin terpuruk ke dalam kekacauan. Pada saat ini, pemimpin militer Qin di Nanhai (sekarang Vietnam utara), Zhao Tuo mengambil kesempatan ini untuk membentuk negara sendiri, Nan Yue, dengan Raja Wu. Ibukota negara Nan Yue berada di daerah Guangzhou sekarang. Namun, Nan Yue kemudian

ditaklukkan oleh Kaisar Han Wudi dari Dinasti Han pada tahun 111 SM. Untuk lebih sepuluh abad selanjutnya, Vietnam utara secara langsung berturut-turut dikuasai oleh Dinasti Han, Dong Wu, Dinasti Jin, Dinasti Sui dan Dinasti Tang.

Pada masa dinasti, pengaruh budaya Cina sudah merasuk pada kehidupan sosial budaya bangsa Vietnam, seperti nilai-nilai ajaran Konghucu, dan Taoisme. Bersamaan dengan itu juga berkembang kepercayaan *Tam Giao* (Tiga Agama), yaitu perpaduan dari Taoisme, kepercayaan masyarakat Cina dan animisme Vietnam. Hengkangnya dominasi kerajaan di wilayah utara mendorong munculnya kerajaan-kerajaan lokal seperti Dai Viet di utara dan Champa di selatan.

Kerajaan Champa mulai terbentuk tahun 192 dan berakhir sekitar tahun 1700-an seiring mulai masuknya desakan dari kekuatan-kekuatan luar. Di masa lalu, kerajaan tersebut telah menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit di Nusantara. Di masa Kerajaan Champa, pengaruh budaya India deras masuk ke Vietnam. Pengaruh agama Budha dan Hindu serta kultur India mendominasi kehidupan masyarakat, yang terlihat pada arsitektur bangunan-bangunan dan kehidupan ritual masyarakatnya. Pengaruh budaya India ke Vietnam ini sebagian juga dibawa melalui Nusantara. Periode Champa ini juga dikenal sebagai masa keemasan. Awalnya kerajaan terbagi dalam empat nagari, yaitu Amaravati (Quang Nam), Vijaya (Binh Dinh), Kauthara (Nha Trang), dan Panduranga (Phan Rang). Keempat nagari itu memiliki kekuatan armada laut yang kuat dan sering digunakan untuk mendukung kegiatan perdagangan. Pada tahun 400-an Masehi, keempat nagari

tersebut bersatu dalam suatu pemerintahan terpusat di bawah kendali Raja Bhadravarman.

Pada tahun 939, orang-orang Vietnam berhasil mengalahkan militer Tiongkok di Sungai Bach Dang dan mendapatkan kemerdekaan setelah sepuluh abad di bawah kontrol Tiongkok. Mereka mendapatkan otonomi secara lengkap satu abad kemudian. Pada masa pemerintahan Dinasti Tran, Dai Viet mengalahkan tiga usaha invasi Mongol di bawah Dinasti Yuan. Tiga kali dengan pasukan yang sangat besar juga dengan persiapan yang hati-hati untuk serangan mereka, tetapi tiga kali berturut-turut orang-orang Mongol dikalahkan sama sekali oleh Dai Viet. Secara kebetulan, pertempuran terakhir di mana jendral Vietnam Tran Hung Dao mengalahkan kebanyakan militer Mongol diadakan lagi di Sungai Bach Dang seperti nenek moyangnya kurang lebih 300 tahun yang lalu.

Feodalisme di Vietnam mencapai titik puncaknya saat Dinasti Le pada abad ke-15, khususnya selama masa pemerintahan Kaisar Le Thanh Tong. Antara abad ke-11 dan 15, Vietnam memperluas wilayahnya ke arah Selatan dalam proses yang disebut Nam Tien (Perluasan ke Selatan). Mereka akhirnya menaklukkan kerajaan Champa dan banyak kekaisaran Khmer.

## Masa Kolonial

Pada pertengahan abad ke-19 M, ketika Kerajaan Prancis mengolonisasi Vietnam. Pemerintahan Perancis menanamkan perubahan signifikan dalam bidang politik dan kebudayaan pada masyarakat Vietnam. Sistem pendidikan modern gaya barat dikembangkan dan agama Katolik diperkenalkan kepada masyarakat Vietnam. Pengembangan

ekonomi perkebunan untuk mempromosikan ekspor tembakau, nila (indigo), teh dan kopi, Perancis mengabaikan permintaan akan pemerintahan sendiri (*self-government*) dan hak-hak sipil yang terus meningkat.

Sebuah pergerakan politik nasionalis dengan cepat muncul, dan pemimpin muda Ho Chi Minh memimpin permintaan akan kemerdekaan kepada *League of Nations* (Liga Bangsa-Bangsa). Tetapi, Perancis memelihara dominasi kontrol terhadap koloni-koloninya hingga Perang Dunia II, ketika perang Jepang di Pasifik memicu penyerbuan ke Indochina.

Sumber daya alam Vietnam dieksploitasi untuk kepentingan kampanye militer Jepang ke Burma, Semenanjung Malay dan India. Pada tahun terakhir perang, pemberontakan nasionalis muncul di bawah komando Ho Chi Minh. Menyusul kekalahan Jepang, pasukan nasionalis melawan pasukan kolonial Perancis pada Perang Indochina Pertama yang dimulai pada tahun 1945 hingga 1954. Perancis mengalami kekalahan besar pada Pertempuran Dien Bien Phu dan dalam waktu singkat setelah itu ditarik dari Vietnam. Negara-negara yang berperang ini kemudian membagi Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan sesuai Perjanjian Jenewa. Perang ini dikenal dengan nama Perang Vietnam.

## Perang Vietnam

Perang Vietnam merupakan salah satu perang terdahsyat yang diikuti Amerika di mana Amerika kehilangan sekitar 58.000 tentaranya yang tewas. Jumlah korban perang Vietnam secara keseluruhan termasuk rakyat sipil Vietnam, tentara Viet Kong dan sebagainya mencapai lebih dari 1.000.000 orang.

Sejarah perang ini diawali tanggal 2 September 1945 di Hanoi, Ho Chi Minh secara umum mendeklarasikan kemerdekaan Vietnam. Ketika para komunis di Vietnam Selatan, Viet Minh, mengikutsertakan pemerintahan kolonial Perancis pada perang gerilya. Tepat setelah deklarasi kemerdekaan tersebut, Ho Chi Minh, pada posisinya sebagai pemimpin pergerakan kemerdekaan di Vietnam Utara, memutuskan untuk bernegosiasi dengan Perancis. Alasannya adalah: pada waktu itu lebih dari 180.000 pasukan nasionalis Cina di Vietnam Utara; Viet Minh di Vietnam Utara merasa secara simultan liberalisasi mereka untuk melawan kekuatan dari kolonial Perancis dan pasukan Cina.

Pada tahun 1946, setelah Perancis membangun kembali pemerintahan kolonial mereka di Vietnam, para nasionalis Cina setuju diberlakukannya kembali pasukan Cina dari Vietnam. Setelah hal ini telah terjadi, Viet Minh menambah serangan mereka terhadap kekuatan kolonial Perancis dan memasangnya juga di bagian Selatan dan Utara Vietnam. 20 November 1953, Perancis menempatkan sebanyak 16.000 pasukannya di Bien Phu, yaitu sebuah lembah pegunungan di sepanjang perbatasan Vietnam Utara dan Laos Utara. Dari Dien Bien Phu, Perancis bermaksud untuk mengawasi daerah perbatasan di antara kedua negara. Hal ini dianggap perlu karena Viet Minh melakukan pergerakan komunis dilengkapi dengan persenjataan di Laos. Militer Perancis percaya bahwa Lembah Dien Bien Phu yang memiliki panjang 19 kilometer dan lebar 13 kilometer, aman dari serangan Viet Minh. Namun pada minggu-minggu dan bulan-bulan berikutnya, pasukan Vietnam di bawah pimpinan Jenderal Giap, menyiapkan penyerangan ke Dien Bien Phu. Dengan bantuan lebih dari

200.000 orang kuli pengangkut barang, Viet Minh mengatur pengangkutan artileri berat ke gunung-gunung yang mengelilingi lembah Dien Bien Phu.

Pada bulan Maret 1954, Viet Minh memulai penyerangan mereka terhadap pasukan Perancis di Dien Bien Phu. Pada tanggal 7 Mei 1954, mereka berhasil menaklukkan pusat komando Perancis. 9.500 anggota pasukan kolonial Perancis ditangkap. Ini merupakan kekalahan paling buruk dalam sejarah pasukan kolonial Perancis. Lebih dari 20.000 orang Viet Minh dan lebih dari 3.000 orang Perancis terbunuh dalam pertempuran di Dien Bien Phu. Perang antara Viet Minh dengan Perancis yang berlangsung selama sembilan tahun, telah menelan korban jiwa yang sangat besar. Lebih dari satu juta warga sipil, 200.000 hingga 300.000 orang Viet Minh dan lebih dari 95.000 anggota pasukan kolonial Perancis telah kehilangan nyawanya.

Pada tanggal 20 Juli 1954 di Jenewa, negosiator Viet Minh dan Perancis setuju membagi Vietnam menjadi dua negara bagian: komunis Vietnam Utara dan kapitalis Vietnam Selatan. Pada tahun 1959-1963, setelah gerilya komunis Vietnam Selatan dapat menjatuhkan pemerintahan Diem, pemerintahan komunis Vietnam Utara mengendalikan jalannya konfrontasi militer. Lebih dari 40.000 gerilya Vietnam Utara masuk ke wilayah selatan, dan memberikan persenjataan dan amunisi kepada komunis Vietnam Selatan, yang dibawa melalui jalan-jalan kecil Ho Chi Minh di wilayah Laos dan Kamboja.

Pada tahun 1961, presiden AS yang baru dipilih, Kennedy, mengirimkan 100 penasihat militernya yang pertama bersama dengan satu unit khusus dengan 400 tentara ke Vietnam. Pada tahun berikutnya, AS menambah jumlah

pasukannya di Vietnam menjadi 11.000 tentara. Pada tanggal 2 Agustus 1964, dua kapal pesiar Amerika di tembaki oleh kapal-kapal patroli Vietnam Utara di Teluk Tonkin. Amerika bersikeras bahwa kapal-kapal pesiar itu berada di perairan internasional, dan menjadikan peristiwa itu sebagai alasan untuk membom Vietnam Utara untuk pertama kalinya. Hanya saja pada tahun 1971, diketahui bahwa dua kapal perang Amerika telah melanggar daerah perairan Vietnam Utara.

Pada bulan Maret 1965, pesawat tempur AS memulai *Operation Rolling Thunder*, pemboman besar-besaran terhadap Vietnam Utara. Sekitar tiga setengah tahun kemudian, bom-bom dijatuhkan di sekitar Vietnam Utara yang jumlahnya dua kali lebih banyak dari jumlah bom yang dijatuhkan pada Perang Dunia II.

Untuk mengurangi pembangunan industri dan penduduk negara, Vietnam Utara memberlakukan desentralisasi total ekonomi dan evakuasi sejumlah orang dari kota-kota. Puncak Perang Vietnam pada tahun 1968, yaitu saat AS mengirimkan hampir setengah juta tentaranya ke Vietnam. Pasukan Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Filipina dan Thailand semuanya berjumlah 90.000 orang. Dan saat itu tentara Vietnam Selatan berjumlah 1,5 juta orang.

Front Pembebasan Nasional di bawah kepemimpinan komunis, yang diberi nama Viet Kong oleh AS, memiliki kekuatan 400.000 pasukan. Pada tanggal 1 Februari 1968, kekuatan Tentara Pembebasan Nasional memulai serangan Tet ke 105 kota-kota di Vietnam Selatan. Walaupun Viet Kong berhasil dipukul mundur dan mengalami kekalahan (kecuali di Hué), serangan Tet ini merupakan saat yang menentukan dalam Perang Vietnam.

Serangan Tet mengakibatkan perubahan sikap AS. Setelah serangan Tet, pemerintahan AS tidak tertarik lagi ingin memenangkan perang. Tapi mereka hanya tidak ingin kehilangan reputasinya sebagai kekuatan militer terhebat. Melalui operasi militer AS, angkatan udara AS melakukan pengeboman ke wilayah Vietnam Utara, dan berakhir pada Oktober 1968. AS mulai menarik kembali pasukan-pasukannya dari Vietnam. Tahun 1969 di Paris, AS, Vietnam Selatan, Vietnam Utara dan Viet Kong melakukan negosiasi untuk menarik seluruh pasukan AS dari Vietnam. Pada tahun 1972, sebelum negosiasi Paris membawa hasil, AS telah mengurangi pasukannya sebesar 100.000 orang dari Vietnam.

Tanggal 30 Maret 1972, terjadi serangan komunis, tapi bukan oleh Vietkong melainkan oleh pasukan Vietnam Utara yang melewati garis demarkasi (17 derajat garis lintang utara) melanggar wilayah Vietnam Selatan. Pengeboman yang dilakukan secara terus-menerus oleh pesawat tempur AS, telah menyebabkan mundurnya pasukan Vietnam Utara.

Pada tanggal 27 Januari 1973, persetujuan gencatan senjata ditandatangani di Paris dan mulai diberlakukan sejak hari itu. Pada bulan Maret 1973, pasukan terakhir Amerika, meninggalkan Vietnam. Dua tahun kemudian, Vietnam Utara dan kekuatan komunis Selatan memulai serangan dengan maksud untuk menguasai negara Vietnam Selatan. Beberapa minggu kemudian, tepatnya tanggal 30 April 1975, pasukan Vietnam Utara menduduki Saigon dan mengakibatkan berakhirnya perang yang telah berlangsung selama tiga puluh tahun.

## Masa Doi Moi

Setelah bersatunya Vietnam Utara dan Selatan, pada tanggal 2 Juli 1976, Vietnam memproklamasikan diri menjadi Republik Sosialis Vietnam hingga sekarang. Pada bulan April 1977, di sepanjang 1.000 Km perbatasan Vietnam-Kamboja terjadi perang antara Vietnam dan Kamboja. Menanggapi seruan Front Solidaritas Kamboja bagi Penyelamatan Nasional, pada bulan Januari 1979, sebuah kekuatan Sukarelawan Vietnam bersama-sama dengan kekuatan patriotik Kamboja berhasil merebut Phnom Penh. Sejak tahun 1982, sukarelawan Vietnam berangsur-angsur ditarik dari wilayah Kamboja, dan setelah penarikan yang ketujuh, tanggal 26 September 1989, seluruh sukarelawan Vietnam beserta peralatan perangnya ditarik kembali ke Vietnam. Sementara itu, pada tanggal 17 Februari 1979, RRC melancarkan serangan di wilayah-wilayah perbatasan Vietnam-RRC. Serangan RRC tersebut dikatakan sebagai pelajaran bagi Vietnam yang telah mencoba masuk ke wilayah RRC.

Untuk memacu pembangunan kembali ekonomi, Kongres Partai Komunis Vietnam ke-6 bulan Desember 1986, mencanangkan Program Renovasi (pembaruan) Vietnam yang dikenal dengan Doi Moi dengan sasaran program utamanya adalah di bidang ekonomi. Program-program pembangunan Vietnam, sejak dicanangkannya program renovasi Doi Moi, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun.

Sebagai hasil dari Doi Moi, perusahaan swasta diizinkan dalam produksi Partai Komunis Vietnam, lebih jauh lagi, dan kemudian didorong dalam sektor industri pertanian Vietnam, yang sebelumnya ditinggalkan oleh Komunis yang berwenang. Reformasi Doi Moi menyebabkan perkembangan dari apa yang sekarang disebut sebagai ekonomi pasar berorientasi

sosialis, di mana negara memainkan peran penting dalam perekonomian, namun perusahaan swasta dan koperasi memainkan peran penting dalam produksi komoditas. Doi Moi membantu Vietnam membangun hubungan diplomatik dengan kapitalis Barat dan Asia Timur pada 1990-an. Partai Komunis Vietnam telah menegaskan kembali komitmennya terhadap orientasi sosialis, dan bahwa Doi Moi merupakan renovasi ekonomi yang dimaksudkan untuk memperkuat sosialisme. Reformasi ekonomi ini pun yang diperkenalkan sebagai kekuatan pasar Vietnam yang disamakan dengan reformasi ekonomi modern China.

**Seni Pertunjukan di Vietnam**

Seni adalah bentuk ekspresi dari sebuah kebudayaan. Ekspresi inilah sering dipengaruhi oleh kebudayaan luar/asing, namun tidak jarang ekspresi ini muncul dari dalam masyarakat budaya kebudayaan itu sendiri. Salah satu bentuk kesenian adalah seni pertunjukan.

Bentuk tertua seni pertunjukan di Vietnam adalah *Hat Cheo*. Pertunjukan ini berkembang dari nyanyian-nyanyian, tarian dan lawakan petani yang ditampilkan pada musim panen dan festival-festival yang lain. Pertunjukan ini seiring dengan waktu menitikberatkan temanya pada sindiran-sindiran sosial. *Hat Cheo* saat ini hanya dikenal di Vietnam Utara, di daerah sungai merah.

Seni pertunjukkan Vietnam yang lain adalah *Hat Boi*, genre opera klasik, yang meniru langsung dari opera Cina. *Hat* berarti ‘menyanyi’ dan *Boi* berarti ‘gerak maknawi’ atau ‘pose’; yang berarti drama musikal yang di dalamnya para aktor bergerak dengan pola-pola yang sudah diatur sebelumnya.

Teks naskah (*Libretti*) Hat Boi diterjemahkan dari bahasa Cina ke dalam bahasa Vietnam. Hingga akhir abad ke-19, *Hat Boi* dipentaskan bagi kaisar Vietnam dan para tamunya di ruangan-ruangan pribadi mereka. Selama abad ke-20, *Hat Boi* telah mengalami kemunduran karena tidak lagi ditopang oleh kerajaan.

*Cat Luong* dan *Tuong Tau* merupakan seni pertunjukan rakyat yang berkembang berdasarkan *Hat Boi* dan dikembangkan oleh bekas penari-penari yang sudah tidak bekerja di istana. *Tuong Tau* merupakan seni pertunjukan *Hat Boi* yang dipopulerkan kembali. Peraturan-peraturan akting *Hat Boi* yang kaku ditinggalkan, sementara tata busana dan rias yang menarik, dan permainan yang kuat tetap dipertahankan. Pada tahun 1930-an, C*ai Luong* berada di puncak popularitasnya. Lakon yang di pertunjukan adalah; sejarah Vietnam, drama Eropa, dan cerita-cerita kontemporer. Di saat *Tuong Tau* secara perlahan meredup, justru C*at Luong* bergerak mencapai puncak.

Sejak Perang Dunia II, persaingan dari bioskop menyusutkan seni pertunjukan Vietnam. *Kich*, adalah seni pertunjukan Vietnam yang berasal dari Prancis. *Kich* satu-satunya genre drama profesional yang mendapat inspirasi dari Barat. Pertunjukan *Kich* saat ini berisi pertunjukan drama satu jam yang didahului oleh dua jam hiburan musik penyanyi-penyanyi pop, tim-tim tari, dan band jazz.

Seni pertunjukan klasik, namun mulai dikembangkan kembali di Vietnam sekarang adalah *Múa Rối Nước* (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi "Wayang Air") adalah sebuah seni pertunjukkan yang berasal dari desa-desa di delta Sungai Merah (*Red River Delta*), Vietnam Utara,

sejak abad ke-11. Pertunjukkan ini berupa boneka yang terbuat dari kayu, yang dilakukan dengan media kolam air sedalam ± 1 meter, dan dimainkan antara enam hingga sepuluh orang penggerak boneka (dalang). Awal mulanya, pertunjukan ini berfungsi sebagai media komunikasi dengan roh nenek moyang. Apabila sawah-sawah di sekitar delta Sungai Merah sedang dilanda banjir, *Múa Rối Nước* di pertunjukan sebagai bentuk hiburan dan doa kepada roh nenek moyang dengan harapan meringankan musibah yang sedang melanda. *Múa Rối Nước* juga dipertunjukkan pada kesempatan hari raya tahun baru tradisional atau pada pesta-pesta adat tradisional. Tema pertunjukan Wayang Air umumnya mencerminkan kehidupan dan aktivitas kebudayaan orang Vietnam, mulai dari musik, busana, adat istiadat, mata pencaharian, hingga folklor, yang menunjukkan ciri khas kebudayaan orang Vietnam. Belakangan, pertunjukkan Wayang Air dapat disaksikan setiap hari di gedung pertunjukkan khusus Wayang Air di Vietnam.

*Múa Rối Nước* yang lebih modern dilakukan di kolam air seluas empat meter persegi. Para penggerak boneka berada di belakang layar bambu, yang terdapat pada hiasan rumah menyerupai kuil. Boneka yang dimainkan memiliki beratnya hingga 15 kg, dan disambungkan menggunakan batang kayu yang panjang. Orkestra tradisional Vietnam yang mengiri pertunjukkan ini meliputi vokal, drum, lonceng kayu, simbal, trompet, *đàn bầu* (alat musik gesek dengan satu senar), gong, dan seruling bambu. Pemain musik dan penyanyi menyanyikan lagu yang menceritakan kisah yang sedang diperankan dalam pertunjukkan. Para musisi dapat berinteraksi selama

pertunjukan, seperti berteriak memberi peringatan, atau memberi dorongan semangat.

*Múa Rối Nước* telah berkembang dari seni pertunjukkan bagi masyarakat Vietnam menjadi pertunjukkan bagi masyarakat di luar Vietnam. Di wilayah Asia Tenggara, pementasan boneka bukanlah sebuah pertunjukkan yang asing. Hampir di tiap-tiap negara memiliki pertunjukkan boneka yang khas, dan *Múa Rối Nước* menjadi simbol identitas orang Vietnam yang membedakannya dengan orang lain.

**Daftar Pustaka**


Abdulgani, Roeslan. 2000. *Indocina Dalam Kawasan Asia Tenggara Dewasa Ini*. Jakarta: Yayasan Indayu.

Acharya, Amitav. 2013. *The Making of Southeast Asia: International Relations of a Region*. New York: Cornell University Press.

Andaya, Barbara Watson. 2006. *The Flaming Womb: Repositioning Women in Early Modern Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press.

Bellwood, Peter S. 2000. *Presejarah Kepulauan Indo-Malaysia*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Bourotte, Bernard. *History of Mountain People of Southern Indochina up to 1945*. Washington DC: Agency fo International Development.

Brandon, James R. 1967. *Theatre in Southeast Asia*. Havard University Press: Cambridge.

Cœdès, George. 1966. *The Making of South East Asia*. Los Angles: University of California Press.

Dardess, John W. 2012. *Ming China, 1368-1644: A Concise History of a Resilient Empire*. Plymouth: Rowman & Littlefield.

Eckersley. M. (ed.). 2009. *Drama From The Rim: Asian Pacific Drama Book*. Drama Victoria: Melbourne.

Hall, Kenneth R., ed. 2008. *Secondary Cities and Urban Networking in the Indian Ocean Realm, C. 1400-1800. Volume 1 of Comparative Urban Studies*. New York: Lexington Books.

Hall, D.G.E. 1988. *Sejarah Asia Tenggara*. Surabaya : Usaha Nasional.

John, Ronald Bruce St. 2006. *Revolution, Reform, and Regionalism in Southeast Asia: Cambodia, Laos, and Vietnam*. London and New York: Routledge.

Karrnow, Stanley. 1997. *Vietnam: A History (2nd edition)*. Penguin: New York

Kim, Nam-Kook, ed. 2014. *Multicultural Challengnes and Redefining Identity in East Asia*. Burlington: Ashgate Publishing.

Majid, Zuraina. 1994. *The Exavation Of Gua Gunung Runtuh: And the Discovery of the Perak Man In Malaysia*. Department of Museums and Antiquity: Kuala Lumpur.

Matsumura, Hirofumi. 1995. "Dental characteristics andaffinities of the prehistoric to modern Japanese with East Asians, American Natives, and Australo-Melanesians." Dalam *Anthropological Science*, volume 103, halaman 235–61.

Matsumura, Hirofumi, Nguyen Lan Cuong, Nguyen Kim Thuy, dan Tomoko Anezaki. 2001. "Dental Morphology of the Early Hoabinhian, the Neolithic Da But, and the Metal Age Dong Son Civilized Peoples in Vietnam." Dalam

*Zeitschrift für Morphologie and Anthropologie*, volume 83, halaman 59–73.

Nguyen, Huy Hong. 2006. *Vietnamese Traditional: Water Puppetry*. Gioi: Hanoi.

Osborne, Milton. 1990. *Southeast Asia: An Illustrated Introduction History*. London: Unwin Hyman Limited.

Sudharmono. 2012. *Sejarah Asia Tenggara Modern: Dari Penjajahan ke Kemerdekaan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Tarling, Nicholas. 2001. *Imperialism in Southeast Asia: A Fleeting, Passing Phase*. London and New York: Routledge.

Taylor, Keith Weller. 1983. *The Birth of Vietnam*. California: University of California Press.

Taylor, Keith Weller. 2013. *A History of the Vietnamese*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tsai, Shih-shan Henry. 1996. *The Eunuchs in the Ming Dynasty*. Albany: SUNY Press.

# ANALISIS ESTETIKA MOTIF BATIK PUCUK REBUNG MALAYSIA

## Pendahuluan

Bicara tentang batik, berarti tidak bisa lepas dari tradisi budaya Jawa. Batik sendiri berasal dari bahasa Jawa "*tik*" yang artinya titik. Dilihat dari proses pembuatannya, kain batik dibuat dengan cara membubuhkan lilin di atas kain yang kemudian dicelup ke dalam cairan pewarna. Fungsi lilin dalam batik adalah sebagai media perintang warna. Jadi, area yang telah dibubuhi lilin akan terlindungi dari warna pada proses pencelupan. Proses pewarnaan dapat dilakukan berkali-kali, sesuai dengan jumlah warna yang diinginkan. Di akhir proses batik, guna menghilangkan lilin yang menempel, kain yang sudah berwarna tersebut di rendam di dalam air panas atau air yang mengandung soda.

Menurut Iwan Tirta (1988:7), para ahli masih banyak yang berbeda pendapat mengenai asal-usul teknik perintang warna tersebut. Pendapat tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mengatakan bahwa teknik perintang warna berasal dari Nusantara; sementara kelompok yang lain mengatakan bahwa teknik perintang warna berasal dari luar Nusantara, antara lain berasal dari India Selatan, Mesir Kuna, maupun Parsi. Iwan

Tirta menambahkan, perbedaan mendasar teknik perintang warna (batik) di Jawa dengan daerah yang lain adalah penggunaan canting sebagai alatnya. Dia membandingkan teknik batik Jawa dengan teknik di India Selatan yang menggunakan stempel atau pena kayu sebagai alatnya.

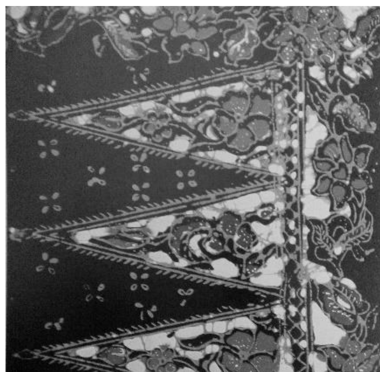
Serupa dengan teknik batik di India Selatan, masyarakat Melayu di daerah Semanjung Malaysia juga mengenal teknik yang serupa, hanya saja alatnya yang berbeda, yaitu menggunakan ubi kentang. Tradisi batik tulis (*conteng*) baru dikenal pada abad ke-18 di wilayah Trengganu - Kelantan.

Motif-motif yang berkembang di wilayah ini adalah motif flora, yang juga digunakan sebagai motif dalam ornamen kain tenun maupun ukiran. Motif-motif tersebut antara lain *Tampuk Manggis*, *Bunga Pecah Lapan*, *Bunga Berbaling*, *Tampuk Manggis*, *Sulur Bakung*, *Pucuk Rebung*, dan lain sebagainya. Khusus untuk *Pucuk Rebung*, motif ini juga dikenal di sebagai motif batik yang dibuat di daerah Jawa. Dalam tradisi Jawa, motif *Pucuk Rebung* dikenal dengan nama *Tumpal*, yang mempunyai arti kepala. Umumnya motif ini digunakan sebagai ornamen tambahan di pinggir atau di tengah kain, yang berfungsi sebagai garis batas ornamen yang satu dengan ornamen yang lain. Motif *Pucuk Rebung* ini juga sering digunakan sebagai ornamen kain songket maupun kain sarung.

**Analisis Motif Pucuk Rebung Malaysia**

Dilihat dari bentuknya, motif ini mempunyai gambaran flora yang berbentuk segitiga, yang merepresentasikan bentuk tunas bambu. Menurut Wessing (1986:49), bentuk dekoratif seperti ini dikenal di wilayah India, Sri Langka, hingga

Indonesia. Bentuk segitiga ini dapat juga berarti gambaran gigi buaya (Roufaer dan Juynboll, 1914:508-510), karena buaya merupakan hewan yang diagungkan[1] dan mudah dijumpai di sungai, rawa, maupun pantai di daerah tropis. Endicott (1970:100) dan Skeat (1972:91) menyebutkan bahwa buaya merupakan perlambang dari Siwa, dewa yang dijadikan dewa tertinggi (*Betara Guru*) dalam kosmologi Jawa. Bentuk motif *Pucuk Rebung* berbeda dengan bentuk *Untu Walang* (gigi belalang), meskipun penggunaannya hampir sama. Perbedaannya adalah: *Pucuk Rebung* memiliki bentuk kerucut yang menyerupai flora, sedangkan *Untu Walang* bentuk kerucutnya polos.



(Gambar 1: Motif Pucuk Rebung)

[1] Dengan adanya pemberian roti buaya dalam upacara pernikahan adat Betawi, hal ini menandakan bahwa masyarakat Betawi menjadikan Buaya sebagai simbol kesetiaan.

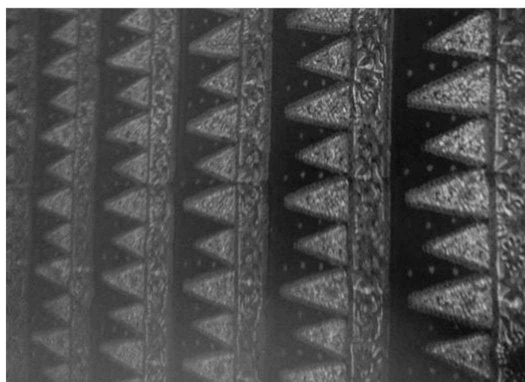
Struktur pucuk rebung yang berbentuk segitiga ini, juga mirip dengan struktur bentuk tumpeng (makanan sesaji masyarakat Jawa) yang merepresentasikan bentuk gunung, dalam hal ini gunung Meru. Dalam kosmologi kebudayaan Jawa-Hindu, Meru digambarkan sebagai puncak gunung yang tinggi, tempat bersemayam para dewa. Meru juga disimbolkan menjadi gambaran proses hidup yang tumbuh dari atas tanah.

Sewan Susanto dalam penelitiannya yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Batik dan Kerajian (1977:240), menyebutkan bahwa motif tumpal ini termasuk dalam golongan motif terang bulan, yaitu motif yang bila dipakai sebagai kain wanita (tapih), dari pinggir bawah terdapat bentuk segitiga yang diberi isi motif batik, sedangkan pada bidang luar segitiga tidak diisi dengan ornamen batik dan berjauhan dengan warna dasar. Besar kecil dan tinggi rendah segitiga pada batik terang bulan ada yang sama berjejer, dan ada yang tidak sama berseling.



(Gambar 2: Motif Pucuk Rebung gaya Lasem)

Secara umum, pucuk rebung bermakna tunas bambu yang ketika kecil dapat dimanfaatkan sebagai makanan, dan ketika berubah menjadi bambu mampu berguna sebagai bahan papan maupun bahan yang lain. Dalam makna lanjutannya, bambu yang sudah tumbuh besar semakin tinggi maka akan semakin menunduk. Hal ini dapat dimaknai sebagai kekuatan tanpa kesombongan. Kekuatan ini merupakan salah satu syarat menjadi pemimpin yang baik. Nilai simbolik pendidikan yang terdapat dalam motif ini adalah pemimpin yang kuat dan mempunyai ilmu pengetahuan serta kharisma yang tinggi, sementara nilai tunas bambu yang masih kecil merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan.



(Gambar 3: Motif Pucuk Rebung gaya Malaysia)

Dalam tradisi Melayu, motif pucuk rebung dibagi menjadi empat, yaitu pucuk rebung bertunas, pucuk rebung sekuntum, pucuk rebung kaluk paku, dan pucuk rebung sirih tunggal. Pucuk rebung bertunas memiliki makna masalah yang

lekas selesai. Pucuk rebung sekuntum memiliki makna musyawarah untuk mencapai mufakat. Pucuk rebung kaluk paku mempunyai makna gotong royong dan saling membantu. Dan pucuk rebung sirih tunggal mempunyai makna menjauhkan diri dari mara-bahaya.



(Gambar 4: Motif Pucuk Rebung Bertunas)



(Gambar 5: Motif Pucuk Rebung Sekuntum)



(Gambar 6: Motif Pucuk Rebung Kaluk Paku)



(Gambar 7: Motif Pucuk Rebung Sirih Tunggal)

Dalam penggunaannya sebagai kain, motif ini tidak memiliki ketentuan siapa yang wajib dan siapa yang dilarang mengenakannya. Itu artinya, motif ini boleh dikenakan oleh wanita dan pria, dari berbagai jenis pekerjaan, dan dalam waktu apa saja.

## Kesimpulan

Tradisi membatik di Malaysia dimulai dengan teknik merintang warna dengan menggunakan ubi kentang sebagai alat capnya. Tradisi merintang warna dengan menggunakan alat canting baru diperkenalkan pada abad ke-18 di daerah Trengganu - Kelantan. Motif batik yang berkembang di daerah Trengganu - Kelantang adalah motif flora yang biasa dipakai dalam motif kain tenun dan ukiran. Salah satu motif tersebut adalah motif pucuk rebung.

Motif pucuk rebung merupakan representasi dari tunas bambu yang baru tumbuh. Motif ini memiliki makna perlambang manusia yang berguna bagi semua orang. Motif ini juga menjadi simbol proses regenerasi kepemimpinan.

Motif pucuk rebung di Malaysia dapat dibagi menjadi empat bentuk, yaitu pucuk rebung bertunas, pucuk rebung sekuntum, pucuk rebung kaluk paku, dan pucuk rebung sirih tunggal. Masing-masing motif mempunyai makna yang berbeda-beda. Dalam penggunaannya, motif ini tidak terikat oleh jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan dapat digunakan dalam acara dan keadaan apa pun.

## Daftar Pustaka

Arney, Sarah. 1987. *Malaysia Batik, Creating New Traditions*. Kuala Lumpur: The Malaysian Handicraft Development Corporation.

Couto, Nasbahry. 2008. *Budaya Visual pada Seni Tradisi Minangkabau*. Padang: UNP Press.

Daryusti. 2006. *Hegemoni Pangulu Dalam Perspektif Budaya*. Jakarta: Penerbit Pustaka.

Endicott, Kirk Michael. 1970. *An Analysis of Malay Magic*. Oxford: Clarendon Press.

Mutia, Riza, dkk. 1997. *Pakaian Pangulu Minangkabau*. Padang: Bahagian Proyek Permuseuman Sumatera Barat.

Rouffaer, G. P., dan H. H. Juynboll. 1914. *De Batik-Kunst in Nederiandsch-Indie en Haar Geschiedenis*. Utrecht: A. Oosthoek.

Sedyawati, Edi (ed.,). 2003. *Warisan Budaya Takbenda*. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.

Skeat, Walter William. 1972. *Malay Magic*. New York: Benjamin Blom, Inc.

Susanto, S.K. Sewan. 1973. *Seni Kerajinan Batik Indonesia*. Yogyakarta: Balai Penelitian Batik dan Kerajinan Lembaga Penelitian dan Pendidikan Industri Departemen Perindustrian Republik Indonesia.

Tirta, Iwan. 1988. *Pustaka Kriya Indonesia: Tekstil*. Jakarta: Dewan Kerajinan Nasional.

# PROTES TERHADAP PEMASANGAN SALIB DI GEREJA *KRISTEN COMMUNITY PRAISE* DI TAMAN MEDAN SELANGOR: STUDI KEBIJAKAN TOLERANSI BERAGAMA DI MALAYSIA

## Pendahuluan

Asia Tenggara, sebagai kawasan yang diapit langsung oleh dua kebudayaan besar, yaitu Tiongkok dan India, merupakan kawasan yang diwarnai oleh perjumpaan beragam etnis, agama, dan budaya. Setidaknya ada tiga agama mayoritas, yang menjadi dasar ideologi beberapa negara di Asia Tenggara, antara lain: Buddha (Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Laos), Islam (Malaysia, dan Brunei Darussalam), dan Kristen (Filipina). Masing-masing agama mayoritas tersebut sering kali terjadi pergesekan antar agama minoritas yang dianut oleh penduduk di negara tersebut, seperti Hindu-Islam di Myanmar dan Thailand; serta Islam-Kristen di Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Di era kontemporer belakangan ini, masalah keberagaman ini menjadi meningkat, terutama masalah intoleransi di kalangan masyarakat dan negara. Tindakan-tindakan intoleransi ini muncul dalam wujud yang ekstrem seperti terorisme dan radikalisme. Merebaknya tindakan intoleransi dan kekerasan atas nama agama telah mengakibatkan kemerosotan nilai mulkulturalisme di masyarakat. Banyak pihak yang ragu dengan daya tahan

bangsa ini menghadapi berbagai persoalan tersebut. Malaysia, dalam hal ini turut mendapat masalah keberagaman yang sama, meskipun menetapkan kebijakan yang berbeda.

Malaysia, meskipun bukan negara Islam, namun menjadikan agama tersebut sebagai agama resmi. Agama ini dipeluk sekitar 52,9 persen populasi penduduk Malaysia, yang sebagian besarnya adalah etnis Melayu. Pemeluk agama non-Islam pada umumnya berasal dari imigran yang didatangkan pada masa kolonial Inggris. Sebelum kedatangan Inggris, masing-masing kerajaan di Malaysia telah menggunakan adat Melayu dan hukum Islam. Pada masa kekuasaan Inggris, ada kecenderungan penggunaan pengadilan agama sebagai alat kontrol masyarakat. Identifikasi Islam dan kemelayuan ini merupakan produk kebijakan kolonial (Nagata, 2005: 66).

Dalam perjalanannya, kebijakan mengenai agama ini tidak melulu selalu berpihak pada agama mayoritas (Islam). Pemerintah Malaysia mengedepankan kebijakan di mana masyarakat yang dominan membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kaum minoritas (Hindu, Buddha, Kristen, *Sikh*, dan Tao). Masyarakat mayoritas Malaysia memberikan ruang kepada kaum minoritas untuk merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka (akomodatif). Hal ini sejalan dengan rumusan pembentukan negara yang menyatakan:

> "*Islam shall be the religion of the state of Malaya, but nothing in this article shall prevent any citizen professing any religion other than Islam, to profess, practise and*

> *propagate that religion, nor shall any citizen be under any disability by reason of not being Muslim*. (Report of the Federation of Malaya Constitutional Commission, 1957: 99)"

Tunku Abdul Rahman secara khusus menegaskan bahwa peranan "resmi" Islam terbatas pada keperluan upacara dan acara-acara publik (Hamid Jusoh, 1991: 99).

Dari sisi pengaturan keagamaan, pemerintah Malaysia membentuk *Malaysian Consultative Council of Buddhists, Christian, Hindus, Sikh and Tao* (MCCBCHST) yang berfungsi sebagai badan yang menengahi konflik antar umat beragama. Pemerintah Malaysia juga mengizinkan berdirinya lembaga *Hal Ehwal Bukan Islam* (HEBI). Pembentukan lembaga yang terakhir itu berkaitan dengan stigma Malaysia sebagai negara yang berideologi Islam, yang tidak ingin mendiskreditkan agama lain dalam praktik keagamaan maupun pengaturan ketetapan dalam pemerintah.

Dalam tulisan ini mencoba untuk membahas bagaimana kebijakan toleransi beragama yang dijalankan di Malaysia. Akan dibahas pula mengenai lembaga agama non-Islam yang mengakomodasi kasus-kasus yang berhubungan dengan gesekan antar agama Islam dan non-Islam. Kasus yang akan diangkat dalam pembahasan di tulisan ini adalah kasus sekelompok warga yang memprotes pemasangan salib di depan Gereja C*ommunity Praise* di Taman Medan, Petaling, Negara Bagian Selangor.

## Lembaga Non-Islam Malaysia Sebagai Lembaga Penyeimbang

Malaysia sebagai negara menggunakan ideologi Islam, memiliki beberapa lembaga yang mengatur dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Salah satu lembaga yang secara khusus menangani masalah non-Islam adalah MCCBCHST. Lembaga yang berdiri pada tahun 1983 ini, memiliki misi untuk mempromosikan *goodwill*, harmoni dan persatuan di antara warga Malaysia terlepas dari keyakinan, agama, ras, budaya atau jenis kelamin. Lembaga ini menekankan dialog sebagai pokok dan sarana untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dari perbedaan dalam masyarakat majemuk.

MCCBCHST dalam lamannya di internet menyebutkan 4 (empat) tujuan berdirinya lembaga ini: (1) untuk meningkatkan pemahaman, saling menghormati dan kerja sama antara orang-orang dari agama yang berbeda, (2) untuk mempelajari dan menyelesaikan masalah yang mempengaruhi semua hubungan antar agama, (3) untuk membuat representasi tentang masalah agama bila diperlukan, dan (4) untuk memajukan dan mempromosikan hak-hak agama, budaya, pendidikan dan sosial dan kepentingan badan-badan keagamaan.

Peranan MCCBCHST ini muncul pertama kali ketika Malaysia menghadapi perdebatan masalah hudud (hukuman Islam) terkait status masyarakat non-Muslim di Kelantan. Di awal tahun 1990, *Pan-Malaysia Islamic Party* (PAS) berniat untuk menegakkan hukum Islam di wilayah Kelantan, tanpa memandang asal agama dan etnisnya (Nagata, 2005: 69-71). Bersama dengan partai politik non-Melayu, lembaga ini bersatu untuk mencegah pengaruh PAS dalam suara di parlemen pusat.

Lembaga lain yang mengurusi urusan yang berkaitan dengan masalah agama non-Islam adalah HESI. Lembaga ini merupakan bagian dari Komite Pemerintah Negara Bagian Selangor. Peranan lembaga ini muncul secara dominan sebagai penengah dalam kasus demonstrasi sekelompok orang yang memprotes pemasangan salib di Gereja C*ommunity Praise* di Taman Medan Selangor.

**Aksi Protes Terhadap Gereja C*ommunity Praise* di Selangor Malaysia**

Pada tanggal 19 April 2015, Gereja C*ommunity Praise* yang beraliran Kristen Multikultural di Taman Medan Petaling Selangor, didatangi oleh sekitar 50 demonstran yang memprotes pemasangan salib di bangunan tersebut. Mereka beralasan bahwa berdirinya gereja itu tidak mempunyai ijin, dan pemasangan salib itu tidak tepat karena berada di lingkungan yang mayoritas masyarakatnya Muslim. Mereka juga memperingatkan bahwa berdirinya gereja di kawasan tersebut dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan wilayah itu.

Kejadian ini memunculkan dua reaksi yang berbeda dari beberapa kalangan. Tokoh-tokoh politik Malaysia turut hadir dalam mengemukakan pandangannya mengenai kasus tersebut. Reaksi yang pertama adalah yang menentang aksi protes. Tokoh-tokoh Malaysia yang masuk dalam penentang aksi protes ini antara lain: (1) Menteri Besar Selangor, Mohamed Azmin Ali, yang mengatakan bahwa aksi protes tersebut tidak dapat diterima karena tidak menghargai simbol agama Kristen. Selanjutnya dia mengatakan bahwa dia akan menindak lanjuti aksi tersebut sebagai tindakan yang

menentang hukum hasutan yang berlaku di Malaysia. (2) Pimpinan UMNO (*United Malays National Organization*), Datuk Saifuddin Abdullah, yang mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan tindakan yang kurang tepat yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku beragama Islam tersebut. Dia berargumen bahwa agama Islam merupakan agama perdamaian, dan menentang kekerasan. (3) Wakil Ketua HEBI, Elizabeth Wong, mengatakan bahwa argumen yang menyatakan bahwa pendirian bangunan gereja harus memiliki ijin kepada masyarakat di lingkungan sekitar, yang diungkapkan dalam aksi protes tersebut, merupakan sebuah kekeliruan. Wong merujuk pada artikel 11 *Perlembangaan Persekutuan* yang menyatakan bahwa ijin pembangunan rumah ibadah cukup dimohonkan kepada pejabat yang terkait, dan tidak perlu memohon ijin kepada masyarakat sekitar. (4) Presiden MCCBCHST, Jagir Singh, berargumen bahwa beribadah dapat dilakukan di mana pun, baik di rumah, kawasan komersial, maupun tempat makan. Pernyataan tersebut membantah protes yang dilakukan dalam aksi tersebut yang terkait mengenai pembangunan gereja di kawasan komersial (kedai). Sejalan dengan pernyataan Wong, Singh juga merujuk pada artikel 11 ayat 3, yang menyatakan bahwa setiap agama mempunya hak untuk memperoleh harta dan mengatur urusannya sendiri tanpa harus mendapat persetujuan. Dan (5) Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mengatakan bahwa aksi protes tersebut telah melanggar undang-undang negara, sehingga dapat dikenai hukum hasutan. Najib Tun Razak menjelaskan bahwa hukum hasutan bertujuan untuk menjamin keamanan dan

keharmonisan, serta melindungi semua pemeluk agama di negara Malaysia .

Di sisi lain, tokoh politik Malaysia yang mendukung aksi ini antara lain: (1) Ketua Kampung Taman Medan, Datuk Abdullah Abu Bakar, yang mengatakan bahwa aksi protes tersebut tidak bertujuan untuk menentang kehadiran umat Kristen di Taman Medan. Abdullah Abu Bakar berargumen bahwa aksi tersebut merupakan reaksi dari rasa cemas penduduk sekitar terhadap pemasangan salib di wilayah yang mayoritas dihuni oleh umat Muslim. (2) Ketua Polis Negara, Tan Sri Khalid Abu Bakar, mengatakan bahwa aksi protes tersebut tidak menyentuh ranah agama. Khalid Abu Bakar berargumen bahwa aksi tersebut dilakukan secara damai, dan sudah diselesaikan dengan musyawarah, sehingga tidak perlu ditindak dengan menggunakan hukum hasutan. (3) Pegawai Perhubungan Awam Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ), Zainun Zakaria, berargumen bahwa pendirian bangunan ibadah dan pemasangan atributnya memerlukan ijin di pemerintahan dan disetujui oleh warga di lingkungan sekitar. Zakaria merujuk pada Akta 133 Seksi 70 (12) yang menyatakan bahwa tempat komersial (kedai) yang dialihfungsikan menjadi tempat ibadah harus mengajukan permohonan tertulis dan mendapat ijin dari lingkungan sekitar .

Dari gambaran tersebut, Farouq Johari membagi 2 (dua) sudut pandang yang terbentuk dalam menanggapi isu protes Taman Medan. Pandangan yang pertama adalah pihak yang menentang aksi protes Taman Medan tersebut, antara lain: (1) agama Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjatuhkan agama lain, sebaliknya lebih bersifat terbuka dan

menghormati semua manusia meskipun berbeda bangsa dan agama, (2) salib telah digunakan sebagai simbol agama, dan tidak menimbulkan masalah kepada orang Melayu Islam, (3) salib tidak bernyawa dan tidak mampu untuk mempengaruhi akidah umat Islam. Salib merupakan simbol suci umat Kristen yang diletakan di gereja, sama seperti lambang bintang dan bulan sabit yang diletakan di masjid, (4) sebagai warga negara Malaysia, sepatutnya menghormati perbedaan etnis dan bangsa. Masing-masing orang berhak beragama dan beribadah, dan (5) adanya indikasi protes tersebut dilakukan setelah mendapat ijin dari Polisi Diraja Malaysia (PDRM) serta pihak yang berwenang setempat.

Sedangkan pandangan kedua adalah yang mendukung aksi protes Taman Medan, antara lain: (1) gereja dibangun di wilayah komersial (kedai) dan tidak mengikuti aturan yang berlaku , (2) etnis Tiongkok di Malaysia diperbolehkan memprotes suara azan dan pembinaan masjid, sehingga mereka menganggap tidak ada salahnya orang Islam memprotes keberadaan salib di luar gereja (kasus pada tahun 2011 di Pantai Hill Park, Kuala Lumpur), (3) anggapan yang mengatakan bahwa umat Kristen masuk ke wilayah kelompok Melayu Islam karena mempunyai agenda tersendiri yang akan mengganggu ketenteraman dan akidah umat Islam, (4) tidak ada korban jiwa dalam protes tersebut, sehingga tidak perlu diperbesar, dan (5) Biro Dakwah Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA) menganggap peletakan salib di kawasan mayoritas umat Islam tidak sesuai aturan dan dianggap tidak sensitif terhadap keadaan lingkungan di sekitarnya.

Pada tanggal 21 Maret 2015, Elizabeth Wong, selaku wakil dari HEBI, mengadakan pertemuan dengan pengurus

Gereja *Community Praise*, dan menyarankan agar mereka memasang kembali salib yang sebelumnya di protes untuk diturunkan pada tiga hari sebelumnya. Wong menggunakan landasan bahwa sejak tahun 2008, pemerintah Malaysia memperbolehkan gereja beroperasi tanpa izin. Wong juga mendorong pihak gereja untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian Malaysia atas tuduhan perkara hasutan.

Dalam kasus aksi protes terhadap pemasangan salib di Taman Medan, Elizabeth Wong dapat dianggap sebagai aktor penengah sekaligus pembela kaum minoritas di Malaysia terhadap tekanan dari kaum mayoritas. Dalam hal ini, HEBI, tempat kerja Elizabeth Wong, merupakan lembaga akomodasi sekaligus penyalur aspirasi bagi agama-agama minoritas di Malaysia.

**Sekilas Tentang Kristen di Malaysia**

Agama Kristen, dan agama non-Islam lainnya, adalah agama minoritas di Malaysia (Yeoh, 2009: 8). Dibandingkan perkembangan Islam di Malaysia, tidak mudah untuk menemukan sumber pustaka yang tepat yang mengkaji perkembangan mengenai agama Kristen di sana. Hal ini mudah dimengerti, mengingat ada stigma yang harus dijaga oleh orang Melayu di Malaysia, bahwa mereka beragama Islam. Wacana keislaman Melayu inilah yang banyak berkembang di laman internet di Malaysia dewasa ini.

Tapi setidaknya kita masih mungkin dapat memahami mengenai perkembangan Kristen di negara ini melalui tulisan Raymond L. M. Lee, yang mengungkapkan bahwa Kristen berkembang melalui gerakan *Charismatic Renewal* pada tahun 1970-an, yang dipengaruhi oleh gerakan yang sama yang

terjadi di Amerika Serikat. Di Malaysia, pergerakan agama Kristen dibagi dalam tiga organisasi, *Christian Federation of Malaysia* (CFM), *Council of Churches of Malaysia* (CCM), dan *National Evangelical Fellowship* (NEF). Secara umum, gerakan Kristen di Malaysia berkomitmen pada penyebaran identitas melalui kelompok-kelompok kecil yang dikontrol penuh oleh gereja. Kelompok-kelompok ini disponsori langsung oleh gereja Katolik, yang dikenal dengan nama *Basic Christian Communities* (Lee, 1988: 411). Gerakan ini lebih mengarah pada kelompok etnis Tiongkok dan India, dibandingkan kepada kelompok etnis Melayu.

Gerakan Kristen ini menimbulkan rasa curiga dari umat Islam di Malaysia. Lee mencatat beberapa kasus yang pernah terjadi antar agama ini. Kasus pertama terjadi pada pertengahan tahun 1986 muncul kasus yang berasal dari dua misionaris Kristen dari Selandia Baru, *Terrence Nesdale* dan *Mary Miesse*. Keduanya didakwa di pengadilan dengan pasal menghina Islam. Penggugat menyatakan bahwa Nesdale telah menyakiti perasaan agamanya dengan mengucapkan, "Islam tidak asli, Nabi Muhammad dan Quran tidak benar." Dalam sidang berikutnya, diperoleh bukti bahwa kasus ini hanyalah kesalahan penafsiran oleh penggugat dari percakapannya dengan Nesdale. Meskipun demikian, Nesdale tetap dikenai hukuman dan penjara selama satu hari.

Kasus berikutnya terkait masalah poster kontroversial yang diberikan secara gratis dalam pembelian album pop Melayu yang direkam oleh artis Eurasia. Pada poster itu, penyanyi digambarkan mengenakan salib emas di lehernya. Setidaknya tiga surat kabar berbahasa Melayu mengeluh bahwa hal itu tidak pantas untuk penyanyi, yang bukan Muslim,

memakai salib, karena banyak penggemarnya adalah Muslim. Kasus ini tidak dibawa ke pengadilan, tetapi distributor album meminta maaf kepada masyarakat Muslim.

Kasus yang lain mengenai kedatangan kapal dagang Doulos di pelabuhan Penang dan Klang. Peristiwa ini digembar-gemborkan secara kontroversial yang melibatkan distributor literatur Kristen untuk umat Islam. Tuduhan berisi mengenai beberapa anggota awak kapal yang telah memberikan salinan Alkitab dan pamflet tentang agama Kristen kepada pengunjung Muslim. Hal ini mengakibatkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri yang melarang Muslim naik kapal tersebut. Namun, pada akhirnya pemerintah menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan hak-hak Muslim individu, dan mencabut larangannya untuk menyelamatkan diri dari rasa malu lebih lanjut.

Dari ketiga kasus terdahulu tersebut, dapat dipastikan bahwa di Malaysia masih rentan terhadap gesekan-gesekan yang terjadi antara umat agama mayoritas (Islam) dan agama minoritas (dalam kasus ini agama Kristen). Konflik itu bisa terjadi karena agama mayoritas di Malaysia sering kali berusaha menegakkan hukum agamanya menjadi hukum negara (Nagat, 2005: 66-68). Pernyataan yang mengatakan bahwa Malaysia adalah negara Islam yang tidak menggunakan hukum Islam, pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman (Hamid Jusoh, 1999: 99). Sebagai bentuk akomodasi atas kebijakan tersebut, pemerintah Malaysia membuat peraturan perihal hubungan antar agama (artikel 11), dan lembaga-lembaga yang mengurusi agama non-Islam (MCCBCHST dan HEBI).

## Kesimpulan

Malaysia, sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang menetapkan pembagian etnis dalam sistem politiknya, secara langsung menghadapi masalah yang multikultur. Kebijakan multikultur ini diatur dalam undang-undang, baik itu ditingkat nasional maupun di tingkat negara bagian. Pemerintah Malaysia, yang dalam hal ini memiliki ideologi Islam, menggunakan otoritasnya sebagai penjaga perdamaian dalam wilayahnya. Dalam kebijakannya, pemerintah Malaysia membuat perundang-undangan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan tertentu bagi kultur kaum minoritas. Malaysia juga merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Dalam hal ini kaum minoritas tidak menantang kultur dominan, dan kultur dominan merangkul dan melindungi kebutuhan kaum minoritas.

Dalam mengantisipasi segala bentuk gesekan yang terjadi akibat perbedaan agama, pemerintah Malaysia membentuk lembaga pengatur, khususnya yang non-Islam, antara lain Presiden *Majlis Perundingan Agama Buddha, Kritian, Hindu, Sikh, dan Tao Malaysia* (MCCBCHST), yang memiliki misi memiliki misi untuk mempromosikan *goodwill*, harmoni dan persatuan di antara warga Malaysia terlepas dari keyakinan, agama, ras, budaya atau jenis kelamin, dan *Hal Ehwal Bukan Islam* (HEBI), yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan masalah agama non-Islam, khususnya yang berada di wilayah Selangor, Malaysia.

Tulisan ini mencoba untuk membahas bagaimana kebijakan toleransi beragama dijalankan dengan melihat pada kasus protes di Taman Medan Selangor. Peristiwa itu memicu reaksi yang beragam dari masyarakat Malaysia, mulai dari masyarakat di media sosial (*nitizen*), hingga para pejabat negara yang terkait. Reaksi atas peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yang mendukung dan tidak mendukung. Pihak yang menolak aksi berpendapat bahwa umat Islam tidak berhak menjatuhkan agama lain, dan sebagai warga negara Malaysia harus menghormati keberagaman etnis di wilayahnya. Sementara pihak yang mendukung berpendapat bahwa pemasangan salib tidak tepat karena berada di lingkungan yang mayoritas beragama Islam, selain itu pembangunan gereja juga berada di wilayah komersial (kedai).

Dari tiga kasus gesekan antar agama Islam dan Kristen sebelumnya dapat dipastikan bahwa di Malaysia masih rentan terhadap konflik antara umat agama mayoritas dan agama minoritas. Konflik itu bisa terjadi karena agama mayoritas di Malaysia sering kali berusaha menegakkan hukum agamanya menjadi hukum negara. Pemerintah Malaysia sebagai pemegang otoritas kebijakan negara berperan dalam membuat aturan dan undang-undang. Pemerintah Malaysia juga membentuk lembaga-lembaga terkait yang berkenaan dengan aktivitas kehidupan beragama di Malaysia.

**Referensi Buku**

Furnivall, J. S. 1967. *Netherlands India : A Study of Plural Economy*. Cambridge : University Press.

Jusoh, Hamid. 1991. *The Position of Islamic Law in the Malaysian Constitution with Special Reference to the Conversion Case in Family Law*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Kim, Nam-Kook. 2014. *Multicultural Challenges and Redifining Identity in East Asia*. Surrey: Ashgate Publishing Limited.

Nagata, Judith. 2005. *How to Islamic Without Being an Islamic State: Contested Model of Development in Malaysia*, dalam buku Akbar S. Ahmed & Hastings Donnan (ed.), *Islam, Globalization and Postmodernity*. New York: Routledge.

Parekh, Bikhu. 2000. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambrigde: Havard University Press.

**Referensi Jurnal**

Azra, Azyumardi. 2007. "*Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia*." Diperoleh 18 Mei 2015, dari http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/3988/3664

Lee, Raymond L. M. 1988. "*Patterns of Religious Tension in Malaysia*." Asian Survey, Vol. 28, No. 4 (April), 400-418.

Shaffer, Jack A. 1982/83. "*Inter-Ethnic Relations in Peninsular Malaysia*." Humbolt Journal of Social Relations, Vol. 10, No. 1, Race & Ethnic Relations: Cross-Cultural Perspectives (FALL/WINTER), 62-82.

Suparlan, Parsudi. 2002. "*Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*." Diperoleh 18 Mei 2015, dari http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/download/3448/2729.

Yeoh, Seng Guan. 2009. "*For/Against Hybridity: Religious Entrepreneurships in a Roman Catholic Pilgrimage Shrine in Malaysia*." Asian Journal of Social Science, Vol. 37, No. 1, Special Focus: Religion, 7-28.

**Referensi Internet**

Astro Awani. (2015, 20 April). *Tiada Unsur Hasutan Dalam Bantahan Gereja Taman Medan - KPN*. Diperoleh 10 Mei 2015, dari http://www.astroawani.com/berita-malaysia/tiada-unsur-hasutan-dalam-bantahan-gereja-taman-medan-kpn-58279

BBC Indonesia. (2015, 21 April). *#Trensosial: Ribut Penurunan Salib Gereja di Taman Medan*. Diperoleh 10 Mei 2015, dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2015/04/150421_trensosial_salip_tamanmedan

Jamal. (2015, 21 April). *Taman Medan Protestor – Whatever Happened To Moderation And Tolerance?* Diperoleh 10 Mei 2015, dari http://malaysiatoday.com/taman-medan-protestors-whatever-happened-to-moderation-and-tolerance/

Jamal. (2015, 23 April). *Somehow, Moderation Is Now A Long Forgotten-Word!!!* Diperoleh 10 Mei 2015, dari http://malaysiatoday.com/somehow-moderation-is-now-a-long-forgotten-word/

Jamal. (2015, 24 April). *IGP'S Brother Protesting – Is That Right Or Is That Wrong?* Diperoleh 10 Mei 2015, dari http://malaysiatoday.com/igps-brother-protesting-is-that-right-or-is-that-wrong/

Johari, Farouq. (2015, 21 April). *Isu Protes Salib Di Taman Medan Dari 2 Sudut Pandangan Berbeza. Mana Satukah Anda?* Diperoleh 10 Mei 2015, dari http://says.com/my/news/isu-protes-salib-di-taman-medan-dari-2-sudut-pandangan-berbeza-mana-satukah-anda

Johari, Farouq. (2015, 24 April). *Rangkuman Penuh Isu Salib Gereja Taman Medan Yang Dikecam Rakyat Malaysia*. Diperoleh 10 Mei 2015, dari http://says.com/my/news/rangkuman-penuh-isu-salib-gereja-taman-medan-yang-dikecam-rakyat-malaysia

Mustafa, Musliza. (2015, 26 April). *Kami Maafkan Peserta Protes, Kata Paderi Gereja Taman Medan*. Diperoleh 10 Mei 2015, dari http://www.themalaysianinsider.com/bahasa/article/kami-maafkan-peserta-protes-kata-paderi-gereja-taman-medan

Redaksi Elshinta.com. (2015, 22 April). *Kontroversi Taman Medan: Peran Kakak Kepala Polisi Malaysia Dalam Protes Gereja Di Taman Medan, Petaling Jaya*. Diperoleh 10 Mei 2015, dari http://elshinta.com/news/9045/2015/04/22/peran-kakak-kepala-polisi-malaysia-dalam-protes-gereja-di-taman-medan-petaling-jaya

Yutim, Haider. (2015, 20 April). *Tindakan Protes Gereja Taman Medan Satu Hasutan - Zahid Hamidi*. Diperoleh 10 Mei 2015, dari http://www.astroawani.com/berita-malaysia/tindakan-protes-gereja-taman-medan-satu-hasutan-zahid-hamidi-58285

**Referensi Laporan**

*Report of the Federation of Malaysia Constitutional Commission*. 1957. London: Colonial Office.

# KONSEP POROS MARITIM INDONESIA: DASAR PEMIKIRAN DAN HAMBATANNYA

Pada tanggal 13 November 2014, pada KTT Asia Timur ke-9 di Myanmar, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan pidato yang berisi tentang Doktrin Poros Maritim Dunia. Pidato tersebut menandakan bahwa Indonesia sudah memulai kebijakan terbarunya, membangun kembali kedaulatan lautnya. Rencana Poros Martim Dunia bukan gagasan yang tiba-tiba ada. Sudah banyak kajian dalam seminar maupun *workshop* tentang kemaritiman Indonesia, baik sejarah maupun masalah yang sering terjadi.

## Dasar Pemikiran Poros Maritim Indonesia

Merujuk pola pikir *United Nations Convention of the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982, batas wilayah sebuah negara meliputi:

- Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang berhubungan satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan

politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap demikian.

- Batas Landas Kontinen (BLK) adalah daerah di bawah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran laut tepi kontinen, sehingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Garis batas luar kondisi kontinen pada dasar laut, tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal atau tidak melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (*isobath*) 2500 m, kecuali untuk elevasi dasar laut yang merupakan bagian alamiah tepian kontinen, seperti pelataran (*plateau*), tanjakan (*rise*), puncak (*caps*), ketinggian yang datar (*banks*) dan puncak gunung yang bulat (*spurs*).
- Batas Laut Teritorial (BLT) adalah garis batas dasar laut dan tanah di bawahnya, dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak maksimal 12 mil dari gurun pangkal teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen.
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Lebar ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal.
- Batas Zona Perikanan Khusus (*Special Fissheries Zone*/SFZ) adalah zona pemanfaatan perikanan yang

ditentukan secara khusus oleh dua negara atau lebih berdasarkan perjanjian internasional.

- Batas Zona Tambahan (BZT) adalah batas jalur laut terletak sebelah luar dari batas terluar laut teritorial yang lebar yang maksimal 24 mil dari gurun pangkal suatu daerah di dalam batas laut teritorial berjarak tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal untuk mencegah pelanggaran peraturan perundangan bea cukai, fiskal, dan imigrasi.
- Titik Acuan adalah titik tetap di darat berupa pilar yang digunakan sebagai acuan penentuan titik awal.
- Titik Awal adalah titik koordinat yang terletak pada garis pantai untuk menentukan garis dasar.
- Pulau terluar adalah pulau yang terletak paling luar pada perairan yurisdiksi, di mana pulau tersebut sebagai penetapan titik dasar (TD).

Pola pikir di atas diperkuat dengan aturannya pada pasal 1, ayat 2:

> *"Negara–negara peserta berarti negara yang telah menyetujui untuk terikat oleh konvensi ini dan untuk mana konvensi ini berlaku,"*

dan pasal 2, ayat 3:

> *"Kedaulatan atas teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya."*

Batas-batas yang sudah disepakati bersama dalam UCLOS 1982 tersebut, yang menjadi dasar pemikiran kedaulatan maritim NKRI selanjutnya.

Dengan mempertimbangkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), antara lain:

- Pasal 25A:
  *"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang berbatasan dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang,"*

- pasal 30, ayat 3:
  "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara,"

- pasal 32, ayat 1:
  *"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya,"*

- pasal 33, ayat 2:
  *"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,"*

- dan pasal 33, ayat 3:

> *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat,"*

maka kedaulatan NKRI baik darat maupun lautannya merupakan hal yang harus ditegakkan.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya pulau-pulau yang membentang di seberang lautan, namun lautan pun menjadi penyatu wilayah yang tidak bisa dipisahkan. Baik kiranya jika perhatian sektor kelautan bisa mendapat perhatian yang lebih dari biasanya, mengingat selama ini NKRI masih berfokus pada perhatian di bagian kepulauannya saja.

**Pilar Utama Poros Maritim Indonesia**

Merujuk pada dasar pemikiran di atas, menurut Presiden Indonesia, Joko Widodo, di KTT Asia Timur ke-9 di Myanmar, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menetapkan lima pilar utama dalam membangun poros maritim dunia. Pilar utama ini antara lain:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, Indonesia menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitas, kemakmuran, dan masa depannya ditentukan oleh pengelolaan di bidang kelautan.
2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.

3. Memberi prioritas kepada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
4. Menjalin diplomasi maritim. Menjalin kerja sama dalam menghilangkan sumber konflik kelautan, misalnya pencurian ikan, pelanggaran kelautan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut.
5. Membangun kekuatan pertahanan maritim. Sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, maka Indonesia wajib membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran.

Rencana lima pilar utama poros maritim di atas adalah bentuk perhatian Indonesia terhadap keamanan dan kesejahteraan bidang kelautan. Hal tersebut bisa berjalan dengan baik, jika Indonesia mampu mengatasi hambatan yang terjadi saat ini.

## Hambatan Poros Maritim Indonesia

Hambatan awal yang terjadi pada pemikiran poros maritim adalah, peraturan tata ruang Indonesia yang masih bertitik berat pada daratan. Karakteristik dan ekosistem alam pesisir dan lautan secara ekologis saling terkait. Apabila perencanaan dan pengelolaan sumber daya laut tidak dilakukan secara terpadu, maka sumber daya tersebut dapat rusak. Dengan demikian, tuntutan terhadap upaya penataan wilayah laut harus dilakukan secara terintegrasi, dan saling terkait sebagai satu kesatuan.

Hambatan kedua yang muncul adalah paradigma pembangunan yang selama ini dititikberatkan pada pembangunan wilayah kontinental dan cenderung mengabaikan peran potensi laut Indonesia. Kekeliruan paradigma pembangunan di antaranya belum tercapainya swasembada ikan. Contoh lain di bidang pembangunan kelautan adalah pada sektor perhubungan laut. Paling tidak, sampai saat ini perhubungan laut Indonesia masih belum bisa mencapai apa yang telah dilakukan oleh Maskapai Pelayaran Belanda (*Koninklikje Paketvaart Maatschappij*/KPM) pada saat beroperasi di Indonesia mulai tahun 1888 sampai dengan tahun 1957. Lombard (2005) perusahaan pelayaran KMP telah membangun sebuah jaringan hebat, teratur, dan tepat waktu. Kapal-kapal tak hanya melayari pelabuhan besar, juga pulau-pulau kecil terpencil. Semua itu diselenggarakan terutama untuk keperluan pemerintahan dan perdagangan kolonial Belanda. Dengan demikian, terpeliharalah hubungan yang teratur dengan Jawa sebagai pusat pemerintahan saat itu. Sampai saat ini, Pelni, perusahaan pelayaran Indonesia yang resmi menggantikan KPM sejak tahun 1957, belum berhasil menyamai kemampuan perusahaan Belanda tersebut.

Hambatan ketiga adalah kebijakan pembangunan dan perikanan. Kebijakan pembangunan dan perikanan selama ini masih dengan konsep yang mengeksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebagai sasaran utama, sementara aspek pemerataan dan keadilan, serta kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup pelaku utama perikanan dan kelautan menduduki peringkat yang rendah. Penekanan pembangunan perikanan dan kelautan kepada eksploitasi sumber daya laut yang dilakukan

secara besar-besaran secara belum merata mengakibatkan penurunan kualitas ekosistem lingkungan, walaupun penurunan kualitas ekosistem laut juga diakibatkan pengelolaan di darat (contoh: pembuangan limbah dan sedimentasi).

Hambatan keempat meliputi masalah penegakan hukum di laut. Menurut Usadi (2014), persoalan utama yang mendapatkan perhatian saat ini dan belum terselesaikan dengan baik adalah adanya beberapa lembaga yang berwenang menangani pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia secara tersendiri dan terpisah, seperti TNI AL, Polair, Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea Cukai, Kejaksaan, Ditjen Perhubungan Laut (Armada PLP/KPLP), Kehutanan dan KKP. Konflik kewenangan tidak jarang terjadi, misalnya yang terjadi antara TNI AL dan Bea Cukai. TNI AL bertugas mengawasi hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), namun wilayah tugas Bea dan Cukai tidak begitu jelas pengaturannya, sehingga tidak jarang terjadi persinggungan antara TNI AL dan Bea Cukai dalam menangani kasus pelanggaran di perairan Indonesia.

Dan hambatan kelima adalah ketimpangan produksi laut Indonesia dengan negara lain. Kontribusi produksi laut Indonesia terhadap GDP senilai 28 milyar (1988) atau 20 %, lebih rendah bila dibandingkan dengan Korea Selatan dengan panjang pantai 2.713 Km, yang kontribusi produksi lautnya mencapai 147 milyar (1992) atau 37%. Nilai ekspor perikanan Indonesia sebesar US $ 1,76 milyar (1998) dengan nilai rumput laut (US $ 45 juta), lebih rendah bila dibandingkan dengan Thailand sebesar US $ 4,2 milyar dengan panjang pantai 2.600 Km.

## Penutup

Wacana poros maritim dunia yang di sampaikan Indonesia dalam KTT Asia Tenggara ke-9 di Myanmar adalah proses salah pembangunan dan kedaulatan Indonesia. Indonesia selama ini masih berfokus pada pembangunan di wilayah darat, sehingga kurang memperhatikan kondisi kelautannya. Padahal, Indonesia memiliki sejarah panjang bagaimana mereka pernah berjaya di wilayah perairannya sendiri. Meskipun memiliki beberapa hambatan yang mungkin masih mengganggu, namun munculnya kebijakan ini jadi salah satu pilar dalam pemerataan pembangunan di Indonesia.

**Referensi**

Dahuri, R. 2000. *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan untuk Kesejahteraan Rakyat*. LISPI. Jakarta.

Jacub Rais, dkk.. 2004. *Menata Ruang Laut Terpadu*. PT Pradyana Paramita. Jakarta.

Lombard, Dennys. 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Buku I, II, & III*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Usadi, Bambang (2014). *Sistem Penegakan Hukum dalam RUU Kelautan*. http://jurnalmaritim.com/2014/09/sistem-penegakan-hukum-dalam-ruu-kelautan. 11 Desember 2014.

# ANALISIS HERMENEUTIK MAKNA IKLAN *BE STUPID*-DIESEL

## Pendahuluan

Hermeneutik adalah ilmu yang mengembangkan metode pemahaman makna melalui penafsiran. Secara prinsip hermeneutik menolak model pendekatan ilmiah, baik induktif maupun deduktif, yang masing-masing bersifat satu arah. Hermeneutik ingin memahami suatu teks dengan memahami keseluruhan teks sebagai sebuah karya. Hermeneutik selanjutnya memahami hubungan antara teks dengan memproduksi seluruh mentalitas dan perkembangan pemroduksi teks itu dalam perspektif sejarahnya (diakronis). Hermeneutik melihat teks sebagai polisemis, sehingga penafsirannya menjadi masalah yang sentral.

Jika berangkat dari teks iklan, dengan menggunakan pendekatan hermeunetik, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengetahui siapa yang membuat teks tersebut, apa pikiran yang ada di balik pembuatan teks itu, bagaimana perkembangan pemikiran pembuat teks itu sampai teks itu dihasilkan, dan seterusnya.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai teks dalam iklan Diesel. Diesel adalah merek *fashion* dari Italia, yang didirikan oleh Renze Ronzo pada tahun 1978. Di tahun 1988,

Diesel memperkerjakan Wilbert Das sebagai Direktur Kreatif, yang bertanggung jawab atas semua desain produk dan komunikasi iklannya. Diesel menggarap dan mengeksplorasi pemasarannya dengan pendekatan yang berbeda dengan merek sejenis, misalnya dengan menggunakan kontes musik, festival film, video game bahkan acara amal untuk AIDS.

Pada awal tahun 2010, Disesel, membuat iklan yang sedikit provokatif, dengan slogan "*Be Stupid*" (Jadilah Orang Bodoh). Pemilihan strategi iklan ini bukan hal yang baru. Sejak tahun 1991, Diesel telah mengembangkan strategi iklan kreatif dengan target usia antara 18-35 tahun. Contoh slogan yang provokatif Diesel yang lain, "*For Successful Living*" (Untuk Kesuksesan Hidup), dan "*Global Warm Ready*" (Siap untuk Pemanasan Global). Gaya dan keaslian iklan ini menggema dalam media massa *offline* dan *online*, yang membantunya mendukung persebaran merek ini dan membangun identitasnya dengan kuat.



SMART HAS THE PLANS, STUPID HAS THE STORIES.
BE STUPID, DIESEL

[Foto: Kaki seorang lelaki yang memakai celana jeans biru dan sepatu berwarna biru; dan kaki wanita lainnya yang tidak tampak menggunakan celana, memakai sepatu berwarna hijau. Kedua pasang kaki tersebut sedang bertumpukan menempati tempat tidur. Seorang wanita tanpa busana yang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur sambil menutup mulutnya dan melirik ke arah dua pasang kaki tersebut.]

Analisa teks ini dimulai dengan menentukan poin-poin apa saja yang harus ada sebagai bagian dari pembahasan. Poin analisis tersebut antara lain:

1. makna unsur-unsur pembentuk teks (bahasa);
2. makna teks berdasarkan latar belakang pemroduksi teks;
3. makna teks berdasarkan lingkungan teks (termasuk gambar dan suasana serta kelompok sasaran);
4. makna teks berdasarkan kaitan dengan teks lain;
5. makna teks berdasarkan dialog teks dengan pembaca; yang semuanya dilihat dalam perspektif sinkronis dan diakronis yang akan mendukung penafsiran atas teks.

**Unsur-Unsur Pembentuk Teks**

a) *SMART HAS THE PLANS* (Orang pintar punya banyak rencana): kalimat pernyataan. Kalimat ini mengandung bahwa seseorang dapat dikategorikan dalam kelompok orang pintar, jika dia memiliki banyak rencana (*plans*).

b) *STUPID HAS THE STORIES* (Orang bodoh punya banyak cerita): kalimat pernyataan. Kalimat ini mengandung pesan bahwa seseorang yang bertingkah bodoh memiliki banyak cerita (*stories*) karena perilakunya tersebut.
c) *SMART HAS THE PLANS, STUPID HAS THE STORIES* (Orang pintar punya banyak rencana, orang bodoh punya banyak cerita). Jika dua kalimat ini dipertentangkan, maka hadir dua unsur utama, yaitu *smart* (pintar) dan *stupid* (bodoh). Masing-masing unsur memiliki pernyataan yang berbeda.
d) *BE STUPID* (Jadilah orang bodoh): kalimat ajakan. Kalimat ini menegaskan untuk memilih salah satu unsur yang dipertentangkan dalam pernyataan sebelumnya, yaitu menjadi orang bodoh (*stupid*).

**Makna Teks Berdasarkan Latar Belakang Pemroduksi Teks**

Teks ini adalah teks iklan, yaitu media massa yang berbentuk bahasa yang tertulis yang dibuat oleh sebuah biro untuk kliennya, yaitu pembuat *fashion* anak muda, Diesel. Tujuannya adalah membentuk pola pikir target pasarnya untuk berlaku berbeda dengan anggapan umum masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa arus globalisasi memaksa seseorang untuk bertindak sama dengan yang lain. Diesel, dalam hal ini, mengampanyekan sikap yang berbeda kepada target pasarnya, dengan gaya bahasa dan kemasan yang relatif mudah diterima oleh kalangan tersebut. Meskipun banyak ditentang oleh kalangan di luar target pasar Diesel, namun justru itulah yang menjadi dasar kekuatan kampanyenya. Produk ini memosisikan dirinya sebagai subjek yang mengerti

kalangan muda yang cenderung tidak mau diatur oleh kalangan yang lebih tua.

**Makna Teks Berdasarkan Lingkungan Teks**

Lingkungan teks terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

a) Gambar/foto seorang perempuan di bawah kasur, dan dua pasang kaki yang berlawanan jenis berada di atas kasur; posisi seorang perempuan di bawah kasur mengisyaratkan telah terjadi sebuah kesalahan. Ekspresi perempuan yang panik itu makin memperlihatkan ketidakberesan tersebut.
b) Hadir dalam kolom iklan. Hal ini berarti teks tersebut dipahami sebagai teks iklan dengan segala pengertiannya.
c) Teks ini dikomunikasikan dalam masyarakat (situasi sosial budaya) yang telah mengenal iklan dan mengenal Diesel sebagai salah satu unsur budaya yang relatif baru.

**Makna Teks Berdasarkan Kaitan dengan Teks Lain**

Teks lain adalah unsur bahasa yang lain di dalam teks yang sama, khususnya iklan. Teks ini dapat dilihat kaitan-kaitannya sebagai berikut:

a) Kaitan ukuran huruf besar dan kecil. Teks dengan huruf yang lebih besar merupakan teks utama yang ditonjolkan lebih dahulu. Teks yang lebih kecil menjadi pendukung dan penjelas. Teks yang lebih kecil ini juga menjadi ajakan agar target pasar memilih dari dua unsur yang ada di dalam teks yang lebih besar.
b) Kaitan antara teks yang bersangkutan dan berbagai teks yang lain, yaitu membicarakan perhatian Diesel terhadap sikap kaum muda.

c) Teks tersebut juga berkaitan dengan gambar dalam iklan lain yang mendukung, misalnya sebuah iklan tentang Diesel yang lain, seseorang berpakaian tertutup yang masuk ke ruangan yang berisi seseorang yang mengenakan bikini, yang cenderung lebih terbuka. Hal ini menandakan bahwa Diesel menaruh posisi sebagai sesuatu yang berbeda dengan yang lain.

**Makna Teks Berdasarkan Dialog Teks dengan Pembaca**

Dialog dengan pembaca teks merupakan satu segi yang banyak diberi tekanan dalam hermeneutik modern. Di sini semakin banyak peranan manusia dan kebudayaannya dalam menentukan makna teks. Dalam proses semiosis, interpretan sebenarnya merupakan dialog dengan tanda. Semiosis pada dasarnya adalah sebuah proses tanpa henti, yang hanya berhenti jika "prinsip-prinsip supra-individual" menguasai "otonomi individual" (Hoed: 2011). Makna adalah sebuah satuan budaya dan setiap pola makna merupakan hasil konvensi dalam kebudayaan manusia.

Diesel menghadirkan pertentangan kata "*smart*" (pintar) dan "*stupid*" (bodoh). Pertentangan ini merupakan trik dalam menghadirkan metode tunggal yang pendek dan simetris, berisi tentang parodi dari ungkapan yang populer, dan lebih banyak menjabarkan tentang kata "*stupid*" (bodoh). Pada akhirnya, slogan ini bukan hanya kalimat pendek sebuah iklan, namun juga sebuah kumpulan cerita dengan dua karakter yang berulang, yang salah satunya berakhir lebih menarik dari yang lain. Pesan tersirat dalam kata "*stupid*" (bodoh) di sini berarti mengambil risiko, berpikir di luar kotak, dan mengejar "hidup bebas tanpa penyesalan."

Iklan ini mengisyaratkan agar mereka berperilaku dengan cara yang dianggap bodoh oleh banyak orang. Mereka harus melakukannya dengan cara terbuka, memuaskan nilai batin yang mereka miliki baik sendiri maupun dalam kelompok. Dengan bertindak bodoh, mereka akan menegaskan posisi yang berbeda (*singularity*) antara mereka dengan lingkungan sekitarnya.

## Kesimpulan

Diesel mencoba mempertentangkan masalah yang sedang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat, yaitu arus globalisasi, yang memaksa mereka untuk bertindak "sama" dengan yang lain. Dari sisi strategi pemasaran, Diesel bergerak dengan tidak menonjolkan sisi keunggulan produknya, yang tentu saja berbeda dengan strategi pemasaran kelompok kebanyakan. Produk ini seolah-olah mengatakan bahwa semua *fashion* atau pakaian sama saja. Setiap orang bisa membeli baju tertentu, atau menambahkan aksesoris sesuai dengan gayanya masing-masing. Yang mereka tonjolkan adalah kampanye identitas, yang membentuk pola pikir masyarakatnya agar bertindak berbeda dengan yang lain.

## Daftar Pustaka

Berlin, James. 1996. *Rhetorics, Poetics, and Cultures*. Urbana: NCTE.

Hoed, Benny H. 2011. *Semiotik & Dinamika Sosial Budaya*. Depok: Komunitas Bambu.

Jacoby, Susan. 2008. *The Age of American Unreason*. New York: Pantheon Books.

Pierce, Charles P. 2009. *Idiot America: How Stupidity Became a Virtue in the Land of the Free*. New York: Doubleday.

## KAJIAN BUDAYA DI ASIA TENGGARA

Asia Tenggara, adalah salah satu kawasan di Benua Asia yang masyarakatnya memiliki keberagaman yang cukup tinggi. Mayoritas negara-negara di sini dibentuk karena penjajahan. Bahkan nama Asia Tenggara itu sendiri baru muncul ketika perang dunia kedua. Jauh sebelum perang dunia tersebut, kawasan di Asia Tenggara telah menjadi jalur perdagangan laut bagi para pedagang yang hendak ke Cina maupun ke wilayah India dan Timur Tengah.

Dengan wilayahnya yang cukup "terbuka", masyarakat di Asia Tenggara terbiasa dengan perbedaan etnis dan kultur. Maka tidak jarang ditemukan ragam budaya yang hampir serupa antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, seperti wayang, batik, makanan tradisional, dsb.



Art-Tour Media Publishing
Babakan RT 005/002 No. 44
Ciluar, Bogor Utara, Kota Bogor, 16710

